



**PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG TAHUN 2016 - 2021**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2016 – 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai Visi RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 adalah TERWUJUDNYA KOTA MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS. Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi tersebut, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapainya.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, maka pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum diharapkan dapat realistis dan mengakomodasi tuntutan pembangunan sampai akhir tahun 2021. Demikian juga sasaran dan target pembangunan yang ditetapkan telah berbasis kinerja yang tidak hanya berorientasi input-output, tetapi berorientasi pula pada manfaat atau outcome yang diperoleh. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Pekerjaan Umum harus menjadi acuan dalam penyusunan program di masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahun.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik bidang pengairan, jalan maupun perumahan dan permukiman serta memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas yang dilakukan.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG**

CHRISATRYA YONAS N, B

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Maksud dan Tujuan	1-2
1.3 Landasan Hukum.....	1-3
1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya	1-4
1.5 Sistematika Penulisan.....	1-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG.....	2-1
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	2-1
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	2-18
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	2-49
2.4 Proyeksi Kedepan dan Kondisi yang diinginkan DPUPR	2-51
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	3-1
3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3-4
3.3 Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi.....	3-13
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	3-22
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis.....	3-31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	4-1
4.1 Telaah Visi dan Misi	4-1
4.2 Tujuan dan Sasaran	4-4
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	4-9

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	5-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	6-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	7-1
BAB VIII PENUTUP	8-1
8.1 Program Transisi	8-1
8.1 Kaidah Pelaksanaan.....	8-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai DPUPR Kota Magelang berdasarkan Jenis Kelamin	2-19
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai DPUPR menurut Tingkat Pendidikan	2-19
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai DPUPR menurut Golongan/Ruang.....	2-20
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai DPUPR menurut Golongan/Pangkat.....	2-20
Tabel 2.6 Daftar Aset dan Proyeksi Kebutuhan Aset DPUPR Kota Magelang....	2-23
Tabel 2.7	31
Tabel 2.2	33
Tabel 2.3	34
Tabel 2.4	35
Tabel 2.5	38
Tabel 3.1	45
Tabel 3.2	45
Tabel 3.3	47
Tabel 3.4	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan amanat undang-undang serta peraturan pemerintah tersebut diatas Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dokumen RPJPD Kota Magelang 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2005. Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025; visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana teknokratik.

RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Rancangan RPJMD disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan rancangan Renstra-SKPD disusun oleh Kepala masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rancangan Renstra-SKPD ditelaah oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar konsisten dengan sasaran program prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman yang memuat tata cara dan ruang lingkup penyusunan Renstra-SKPD yang baku.

Perubahan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2016 - 2021. Substansi Rencana Strategis SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dilengkapi dengan rincian Kegiatan yang bersifat indikatif berupa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Dengan adanya Renstra,

diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (**Good Government**).

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang Tahun 2016-2021 pada dasarnya merupakan upaya untuk mengoperasionalkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang.

Adapun untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang diperlukan tahapan – tahapan yang meliputi :

- a. Tahap mempelajari Visi, Misi dan Program Walikota Magelang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
- b. Tahap menyusun rancangan Perubahan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sesuai Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang adalah menyediakan dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pedoman resmi bagi seluruh jajaran Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menentukan prioritas program dan rencana lima tahunan baik pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten perbatasan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan perubahan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :

- a. Mempertajam perencanaan yang sudah dilakukan serta melakukan perbaikan Renstra 2016 – 2021.
- b. Menjabarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 kedalam

rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang;

- c. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan serta menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja OPD di bidang pekerjaan umum, penataan ruang.
- d. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja tahunan dari tahun 2016-2021;

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Magelang adalah:

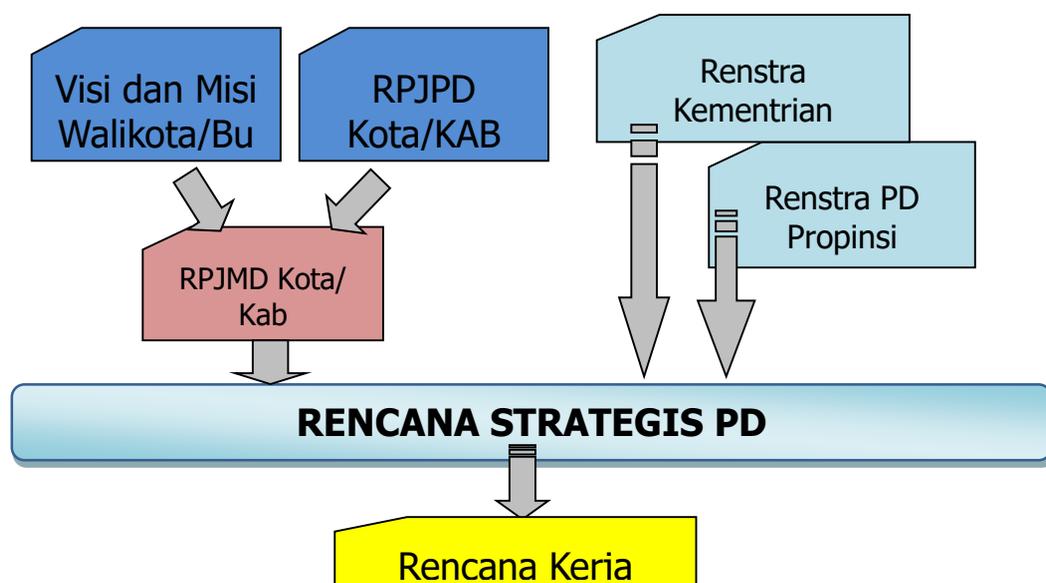
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2011-2015;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya

Rencana Strategis 2016 - 2021 disusun terkait dengan RPJM Kota Magelang 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran dari Visi - Misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2016 - 2021 serta mengacu pada RPJP Daerah Kota Magelang Tahun 2005 - 2025 dan mengakomodasi Rencana Kerja (RENJA) (unit kerja / UPT di bawahnya). Rencana Strategis ini juga disinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPERA), Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Bina Marga provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang Tahun 2016 - 2021 mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan lainnya yang dapat dilukiskan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:



Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka sinergi antara berbagai sumber pembiayaan akan dapat diwujudkan. Jadi Rencana Strategis ini dirancang agar peka terhadap kondisi internal dan eksternal yang berubah

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah paling sedikit memuat bab-bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Megemukakan secara ringkas pengertian perubahan renstra OPD, fungsi perubahan renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan perubahan renstra OPD, keterkaitan perubahan renstra OPD dengan RPJMD, renstra K/L dan renstra provinsi/Kabupaten/kota dan dengan renja OPD. Selain itu juga ditampilkan landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang :

- Peran, tugas dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
- Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
- Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui perubahan renstra OPD periode sebelumnya,
- Mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan
- Mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui perubahan renstra OPD ini.

Dalam Bab ini juga ditampilkan tantangan dan peluang pelayanan OPD, dalam merumuskan tantangan dan peluang pelayanan, pada intinya dimulai dari pemahaman kepala OPD tentang visi dan misi kepala daerah dan berawal pemahaman itu, dan apabila disandingkan dengan sumber daya yang dimiliki, maka kepala OPD merumuskan tantangan yang dihadapi dan peluang yang dimiliki untuk memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat isu-isu strategis OPD yang didasari dari pemahaman visi dan misi kepala daerah, kemudian muncul isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti. Untuk menentukan urutan isu strategis menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria yang disepakati

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran visi Misi kepala daerah yang sesuai tugas dan fungsi PD yang lebih spesifik dan terukur dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi penjelasan umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dalam periode 5 (lima) tahun dan tahunan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Memuat program transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA MAGELANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang yang digunakan adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah. Sesuai dengan Perda tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Perda Nomor 1 Tahun 2016 tersebut merupakan pengganti Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Perda Nomor 4 Tahun 2008 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sesuai PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG mempunyai beberapa fungsi. Adapun fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang yang terdiri dari :

- I. KEPALA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan dan umum kepegawaian dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

2. RINCIAN TUGAS :

- a) Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d) Memberikan pelayanan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan perizinan lainnya.
- e) Menyelia pelayanan dan bantuan kepada Organisasi Perangkat Daerah di bidang perencanaan teknis konstruksi dan perhitungan anggaran.
- f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- g) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h) Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah dilingkup tugasnya.
- i) Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- j) Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- k) Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

II. SEKRETARIS

1. TUGAS DAN FUNGSI :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.
2. RINCIAN TUGAS :
- a) Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat.
 - b) Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - c) Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - d) Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - e) Mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
 - f) Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - g) Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - h) Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - i) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - j) Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
 - k) Mengkoordinir pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - l) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat.
 - n) Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - o) Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - p) Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat.
 - q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Dibawah Sekretariat Dinas adalah sebagai berikut :

1. Nama Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.

3. RINCIAN TUGAS :

- 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- 3.2. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 3.3. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang.
- 3.4. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.
- 3.5. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 3.6. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 3.7. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 3.8. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 3.9. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 3.10. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 3.11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- 3.12. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 3.13. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- 3.14. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- 3.15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

1. Nama Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. RINCIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- f. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

1. Nama Jabatan : KEPALA BIDANG BINA MARGA DAN PENGAIRAN

2. Tugas Dan Fungsi :

Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bidang bina marga dan Pengairan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang Bina Marga dan Pengairan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Bina Marga dan Pengairan.

- c. Pelaksanaan kegiatan bidang Bina Marga dan Pengairan.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Bina Marga dan Pengairan.

3. Uraian Tugas :

- 3.1. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bina marga dan pengairan
- 3.2. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan rekomendasi mengenai gambar kerja dan spesifikasi teknis kegiatan pembangunan fisik di bidang kebinamargaan dan pengairan.
- 3.3. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan rekomendasi atas rencana pengeluaran perizinan/non perizinan di bidang bina marga dan pengairan.
- 3.4. Mengkoordinir pengawasan pembangunan dan mutu pembangunan jalan serta jembatan.
- 3.5. Mengawasi pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi serta pemeliharaan berkala jaringan irigasi.
- 3.6. Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait di bidang pengairan.
- 3.7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan.
- 3.8. Mengkoordinir pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai.
- 3.9. Mengkoordinir pengelolaan dan pengembangan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sistem Air Limbah Rumah Tangga domestik.
- 3.10. Mengkoordinir pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan.
- 3.11. Menyelia pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- 3.12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bina marga dan pengairan.
- 3.13. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 3.14. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- 3.15. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang bina marga dan pengairan.
- 3.16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

1. Nama Jabatan : KEPALA SEKSI JALAN DAN JEMBATAN

2. Tugas Dan Fungsi :

Kepala Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan dalam sub bidang jalan dan jembatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Jalan dan Jembatan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan.

3. Rincian Tugas :

- 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan.
- 3.2. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang jalan dan jembatan.
- 3.3. Menyiapkan bahan analisa data jalan dan jembatan.
- 3.4. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi gambar kerja dan Rencana Kerja dan spesifikasi teknis kegiatan pembangunan fisik jalan kota dan jembatan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- 3.5. Melaksanakan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan.
- 3.6. Memantau dan mengendalikan mutu pembangunan pekerjaan jalan dan jembatan.
- 3.7. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai.
- 3.8. Mengkoordinir pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- 3.9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan.
- 3.10. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 3.11. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- 3.12. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan.
- 3.13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

1. Nama Jabatan : KEPALA SEKSI PENGAIRAN

2. Tugas Fungsi :

Kepala Seksi Pengairan mempunyai tugas fungsi membantu Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan dalam sub bidang pengairan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi pengairan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengairan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengairan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengairan.

3. Rincian Tugas :

- 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengairan.
- 3.2. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pengairan.
- 3.3. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi serta pemeliharaan berkala jaringan irigasi.
- 3.4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengairan.
- 3.5. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sistem Air Limbah Rumah Tangga domestik.
- 3.6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pengairan

- 3.7. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 3.8. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- 3.9. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Pengairan
- 3.10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

1. Nama Jabatan : KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan dalam sub bidang pengendalian dan operasional.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengendalian dan Operasional.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian dan Operasional.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian dan Operasional.

3. RINCIAN TUGAS :

- 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengendalian dan Operasional.
- 3.2. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pengendalian dan Operasional.
- 3.3. Melaksanakan pemeliharaan rutin dan penanggulangan kerusakan fisik jalan kota, jembatan dan pengairan.
- 3.4. Menyiapkan bahan rekomendasi gambar kerja dan spesifikasi teknis kegiatan pemeliharaan dan pembangunan fisik jalan kota dan jembatan.
- 3.5. Memantau dan mengendalikan mutu pembangunan dan pemeliharaan pekerjaan di bidang pengendalian dan operasional.
- 3.6. Menyiapkan bahan rekomendasi atas rencana pengeluaran perizinan/non perizinan di bidang bina marga dan pengairan.
- 3.7. Mempersiapkan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan.
- 3.8. Melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan.
- 3.9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pengendalian dan Operasional.
- 3.10. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 3.11. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- 3.12. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Pengendalian dan Operasional.
- 3.13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

1. Nama Jabatan : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bidang Cipta Karya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang Cipta Karya;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Cipta Karya;
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya;
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Cipta Karya.

3. RINCIAN TUGAS :

- 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Cipta Karya.
- 3.2. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Cipta Karya.
- 3.3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pembangunan gedung.
- 3.4. Menyelia pemberian bantuan teknispembangunan gedung.
- 3.5. mengkaji data dan informasi sebagaibahan rekomendasi sertifikat layak fungsi bangunan gedung.
- 3.6. mengkaji bahan penyusunan rencana dan gambar konstruksi bangunan gedung beserta perhitungan anggarannya.
- 3.7. Mengkaji bahan rekomendasi gambar kerja kegiatan bangunan gedung negara dan bangunan umum.
- 3.8. Mengkaji bahan rekomendasiIzin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 3.9. Mengawasi pemeliharaan dan Rehab Bangunan Gedung Negara.
- 3.10. Menyusun draft kajian terhadap pembangunan kawasan yang diprioritaskan penanganannya.
- 3.11. Melaksanakan pembinaan jasa konstruksi
- 3.12. mengkoordinir monitoring, evaluasi dan pelaksanaan jasa konstruksi
- 3.13. melaksanakanpelatihan tenaga terampil konstruksi.
- 3.14. Mengkaji bahan sistem informasi jasa konstruksi
- 3.15. Mengkaji tinjauan teknis pengajuan ijin usaha jasa konstruksi.
- 3.16. Mengkoordinir Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- 3.17. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BidangCipta Karya.
- 3.18. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 3.19. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- 3.20. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan BidangCipta Karya.
- 3.21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

1. Nama Jabatan : KEPALA SEKSI BANGUNAN GEDUNG

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan dalam sub bidang bangunan gedung.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Bangunan Gedung mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Bangunan Gedung.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bangunan Gedung.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Bangunan Gedung.

3. RINCIAN TUGAS :

- 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Bangunan Gedung.
- 3.2. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bangunan gedung.
- 3.3. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pembangunan gedung.
- 3.4. Melaksanakan bantuan teknis pembangunan gedung.
- 3.5. Melaksanakan pengawasan pembangunan gedung.
- 3.6. Menyiapkan bahan rekomendasi sertifikat layak fungsi bangunan gedung.
- 3.7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan gambar konstruksi bangunan gedung beserta perhitungan anggarannya.
- 3.8. Menyiapkan bahan rekomendasi gambar kerja kegiatan bangunan gedung negara dan bangunan umum.
- 3.9. Menyiapkan bahan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB).
- 3.10. Melaksanakan pemeliharaan dan Rehab Bangunan Gedung Negara.
- 3.11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bangunan Gedung.
- 3.12. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 3.13. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- 3.14. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Bangunan Gedung.
- 3.15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

1. Nama Jabatan : KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

3. RINCIAN TUGAS :

- 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- 3.2. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- 3.3. Mengolah dan menganalisa data tentang Bangunan Gedung di kawasan yang diprioritaskan penanganannya.
- 3.4. Melakukan kajian terhadap pembangunan kawasan yang diprioritaskan penanganannya.
- 3.5. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan gambar konstruksi bangunan gedung beserta perhitungan anggarannya.
- 3.6. Menyiapkan bahan rekomendasi gambar kerja kegiatan bangunan gedung.
- 3.7. Melaksanakan pemeliharaan dan rehab Bangunan di kawasan yang diprioritaskan penanganannya.
- 3.8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
- 3.9. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 3.10. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- 3.11. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
- 3.12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

1. Nama Jabatan : KEPALA SEKSI JASA KONSTRUKSI

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Jasa Konstruksi.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Jasa Konstruksi.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Jasa Konstruksi.

3. RINCIAN TUGAS :

- 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Jasa Konstruksi.
- 3.2. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Jasa Konstruksi
- 3.3. Menyiapkan bahan pembinaan jasa konstruksi
- 3.4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan jasa konstruksi
- 3.5. Menyiapkan bahan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- 3.6. Menyiapkan bahan Analisa Harga Satuan Pekerjaan
- 3.7. Menyiapkan bahan sistem informasi jasa konstruksi
- 3.8. Melaksanakan tinjauan teknis pengajuan ijin usaha jasa konstruksi.

- 3.9. Melaksanakan Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- 3.10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SeksiJasa Konstruksi
- 3.11. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 3.12. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- 3.13. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan SeksiJasa Konstruksi
- 3.14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

1. Nama Jabatan : KEPALA BIDANGPENATAAN RUANG

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Magelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang Penataan Ruang
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penataan Ruang
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang Penataan Ruang.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Penataan Ruang

3. RINCIAN TUGAS :

- 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang.
- 3.2. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penataan ruang tingkat Kota Magelang.
- 3.3. Melaksanakan Pembinaan penataan ruang tingkat Kota Magelang.
- 3.4. Melaksanakan Pengembangan sistem informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
- 3.5. Melaksanakan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota
- 3.6. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang penataan ruang.
- 3.7. mengkaji bahan dan data sebagai bahan rekomendasi/keteranganterkait perencanaan dan pemanfaatan ruang.
- 3.8. Menyusun draft penetapan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang.
- 3.9. Menyusun draft penetapan dan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.
- 3.10. Menyusun draft penetapan dan peninjauan kembali Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis atau Kawasan yang diprioritaskan penanganannya.

- 3.11. Mengkoordinir Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- 3.12. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan dan operasionalisasi PPNS Penataan Ruang.
- 3.13. mengkaji data dan informasi sebagai bahan rekomendasi teknis rencana pemanfaatan ruang.
- 3.14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang.
- 3.15. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 3.16. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- 3.17. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Penataan Ruang.
- 3.18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

1. Nama Jabatan : KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengaturan dan pembinaan tata ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.

3. RINCIAN TUGAS :

- 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
- 3.2. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
- 3.3. Menyiapkan bahan Pembinaan dalam pelaksanaan penataan ruang tingkat Kota Magelang.
- 3.4. Menyiapkan bahan Pengembangan sistem informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
- 3.5. Menyiapkan bahan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota
- 3.6. Melaksanakan program dan kegiatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang penataan ruang.
- 3.7. Menyiapkan bahan dan data sebagai bahan rekomendasi/keterangan terkait perencanaan dan pemanfaatan ruang.
- 3.8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.

- 3.9. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 3.10. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- 3.11. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
- 3.12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

1. Nama Jabatan : KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang dan kawasan strategis dalam sub bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang.

3. RINCIAN TUGAS :

- 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang.
- 3.2. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang.
- 3.3. Menyiapkan bahan penetapan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang.
- 3.4. Menyiapkan bahan penetapan dan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.
- 3.5. Menyiapkan bahan penetapan dan peninjauan kembali Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis atau Kawasan yang diprioritaskan penanganannya.
- 3.6. menyiapkan bahan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, serta koordinasi penyusunan rencana pembiayaan program pemanfaatan ruang.
- 3.7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
- 3.8. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 3.9. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- 3.10. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
- 3.11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

1. Nama Jabatan : KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis dalam sub bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

3. RINCIAN TUGAS :

- 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 3.2. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 3.3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- 3.4. Melaksanakan Koordinasi, pembinaan dan operasionalisasi PPNS Penataan Ruang.
- 3.5. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis rencana pemanfaatan ruang.
- 3.6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 3.7. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 3.8. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- 3.9. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 3.10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN ALAT BERAT

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Alat Berat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pelayanan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan upaya pengelolaan alat berat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPTD Pengelolaan Alat Berat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPTD Pengelolaan Alat Berat.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pengelolaan Alat Berat.
- c. Pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Alat Berat.

3. RINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan UPTD Pengelolaan Alat Berat.
- b. Mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan perumusan kebijakan teknis urusan pengelolaan alat berat.
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kualitas pelayanan UPTD Pengelolaan Alat Berat.
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya peningkatan kualitas pelayanan UPTD Pengelolaan Alat Berat.
- e. Merencanakan dan mengusulkan pengadaan alat berat.
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan penggunaan alat berat untuk pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Melaksanakan pemeliharaan alat berat.
- h. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan.
- i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD Pengelolaan Alat Berat.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENGELOLAAN ALAT BERAT

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Alat Berat mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Pengelolaan Alat Berat dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

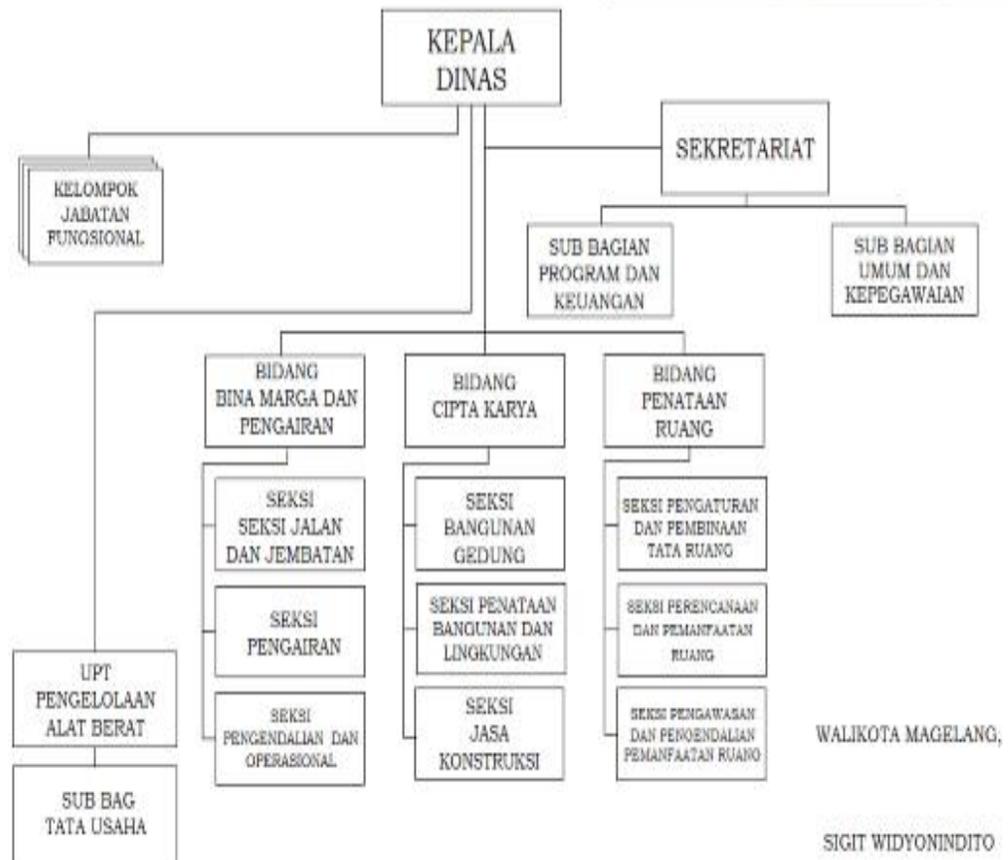
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Alat Berat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

3. RINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Menyediakan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPTD Pengelolaan Alat Berat.

- c. Membantu atasan dalam mengelola dan mengembangkan pelayanan UPTD Pengelolaan Alat Berat.
 - d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data UPTD Pengelolaan Alat Berat.
 - e. Melaksanakan pengelolaan inventaris dan menyusun rencana kebutuhan UPTD.
 - f. Melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga.
 - g. Melaksanakan kegiatan administrasi, ketatausahaan dan pengelolaan urusan keuangan dan retribusi yang bersumber dari sewa alat berat.
 - h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.



2.1. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

a. Susunan Kepegawaian

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang terbagi atas 3 (Tiga) Bidang, 1 (Satu) Sekretariat dan 3 UPTD. Sedangkan jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sampai dengan Januari 2017 berjumlah 48 orang dengan komposisi sebagai berikut:

❖ Menurut Jenis Kelamin :

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang menurut Jenis Kelamin lebih didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin laki-laki atau sebesar 91,67 % dari total pegawai sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	44	91,67 %
2	Perempuan	4	8,33 %
		48	100,00 %

Sumber : Data Kepegawaian DPU Kota Magelang, 2017

❖ Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sebagian besar adalah Sarjana dan Sarjana Muda atau sebesar 37,31% dari total pegawai sebagaimana tabel 2.2:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Pasca Sarjana/ S2	5	10,41%
2	Sarjana/ Sarjana Muda	19	39,58%
3	SMA dan sederajat	14	29,17%
4	SMP dan sederajat	6	12,5%
5	SD dan sederajat	4	8,3%
		67	100%

Sumber : Data Kepegawaian DPU Kota Magelang, 2017

❖ Menurut Golongan/Ruang :

Komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang menurut pangkat/golongan sebagian besar adalah pegawai dengan

golongan III atau sebesar 52,24 % dari total pegawai sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum
Kota Magelang Menurut Golongan/Ruang

No	Jabatan	Jumlah	Prosentase
1	Golongan IVA	3	6,25 %
2	Golongan IIID	4	8,33 %
3	Golongan IIIC	8	16,67 %
4	Golongan IIIB	8	16,67 %
5	Golongan IIIA	1	2,08 %
6	Golongan II	19	39,58 %
7	Golongan I	5	10,41 %
		48	100%

Sumber : Data Kepegawaian DPU Kota Magelang, 2017

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang paling banyak bergolongan/ruang II, sebagian dari mereka berijazah SMA, sehingga untuk tugas dan operasional di lapangan dapat dimaksimalkan.

❖ Menurut Jenjang Jabatan :

Komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Pejabat Eselon I sebesar 1,49%, Pejabat Eselon III dan IV sebesar 28,36 %, sedangkan jumlah staf sebesar 70,15% dari total pegawai sebagaimana tabel 2.4 berikut::

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Magelang Menurut Golongan/Pangkat

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II B	0	0 %
1	Eselon III A	1	2,08 %
2	Eselon III B	3	6,25 %
3	Eselon IV A	12	25 %
4	Eselon IV B	1	20,83 %
5	Staf	31	64,58 %

		48	100%
--	--	----	------

Sumber : Data Kepegawaian DPU Kota Magelang, 2017, data diolah

Berdasarkan tabel 2.4 diatas terlihat bahwa mayoritas sebanyak 64,58% karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kota Magelang adalah staf. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan tangan kerja DPU-PR cukup signifikan untuk menjalani tugas-tugas lapangan.

Jumlah karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang jika dibandingkan dengan kondisi 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu pada akhir tahun 2010 dengan jumlah 82 orang berkurang sebesar 32 orang sehingga menjadi 48 orang.

b. Aset yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

Aset merupakan salah satu pendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan baik terkait dengan tugas kedinasan maupun teknis penyelesaian pekerjaan. Aset yang terpelihara dengan baik akan menjadi satu modal pendukung bagi suatu institusi dalam pencapaian tujuan namun asset yang tidak terkelola dengan baik hanya akan menjadi beban bagi institusi tersebut karena setiap asset butuh biaya perawatan yang tidak sedikit. Aset utama pendukung tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Daftar Asset dan Proyeksi Kebutuhan Asset
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	Proyeksi kebutuhan						Ket
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Komputer	17	Unit			3	2	1		Rencana dihapus 6 unit pada tahun 2018
2	Monitor	12	Unit							
3	Printer	28	Unit				2	7		Tahun 2018 dihapus 6 unit, kondisi 2016 rusak semua
4	Notebook / Laptop	23	Unit			3		1	2	Tahun 2006 dihapus 1, tahun 2007 dihapus 3, tahun 2008 dihapus 1
5	LCD Proyektor	1	Unit					1		tahun 2013 dihapus 1
6	Mesin Tulis / Mesin Ketik	9	Unit							
7	AC Sentral	5	Unit						1	
8	AC Split	1	Unit							
9	Filling Cabinet	42	Unit				4			Brother pengadaan tahun 2007 dihapus 4

10	Kendaraan Roda 4	7	Unit						
11	Ruang Sidang/Rapat (daya tampung)	25	Orang						
12	Truck	2	Unit						
13	Pick up	5	Unit						
14	kendaraan roda 2	13	Unit						
15	Breathing Asparatus	3	Unit						
16	Lampu Rotary Merah	7	Unit						
17	Mesin Dalam	4	Unit						
18	Mesin luar uap	1	Unit						
19	Selang 1 1/2	8	Unit						
20	Folding Bed	14	Unit						
21	drum racun api	2	Unit						
22	Alat Kantor PMK : pompa portable 1 unit, selang penyemprot 1 1/2". 2 roll	1	Unit						
23	Almari	24	Unit						
24	Almari/rak buku	2	Unit						
25	Almari 2 Pintu	13	Unit						
26	Almari arsip pintu kaca	5	Unit			2	2		
27	Almari Besi	4	Unit						
28	Almari buku kaca	6	Unit						
29	Almari es	1	Unit						
30	Almari Gambar 8 laci	3	Unit						
31	Almari Kaca 2 pintu	3	Unit						
32	Almari Katalog (kayu)	4	Unit						
33	Backhoe loader	1	Unit						
34	Baju Tahan Api	2	Unit						
35	Bangku Tunggu	1	Unit						
36	Brankas (Tahan Api)	4	Unit						
37	Camera	2	Unit			2			

38	CCTV beserta kelengkapannya	1	Unit						
39	Compresor Breathing Asparatus	1	Unit						
40	Digital Multi Tester	2	Unit						
41	Discussion System	1	Unit						
42	Dispenser	8	Unit						
43	DVD Player	1	Unit						
44	Exhause Fan, Ventilating Fan	1	Unit						
45	Faksimile	1	Unit						
46	Filling Besi	6	Unit						
47	Filling Kabinet 2 laci	3	Unit				1		
48	Filling Kayu	2	Unit						
49	Fire Jacket	10	Unit						
50	Genset Silent	1	Unit						
51	Gerobag Sampah	1	Unit						
52	Gerobag Sorong	5	Unit						
53	Gordyn vertical blind	1	Unit						
54	GPS	3	Unit						
55	Hammer test digital	1	Unit						
56	Hammer test analog	1	Unit						
57	Handycam	1	Unit						
58	Intelegent UPS	2	Unit						
59	Jack hammer	1	Unit						
60	Kabel VGA	1	Unit						
61	Kipas Angin	8	Unit						
62	Komposter Komunal	1	Unit						
63	Kursi	10	Unit						
64	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5	Unit			4	2	4	
65	Kursi Kerja	9	Unit						
66	Kursi Kerja Struktural	38	Unit				2		

67	Kursi Putar/ Kursi Putar Tangan/kursi kerja putar	18	Unit							
68	Kursi Kerja Staf	9	Unit				3			
69	Kursi lipat meja rapat	32	Unit							
70	Kursi Panjang tunggu	6	Unit							
71	Kursi rapat	6	Unit							
72	Kursi Tamu	1	Unit							
73	Kursi Tangan	2	Unit							
74	Kursi susun	50	Unit							
75	Layar / Screen	1	Unit							
76	Lemari Kayu	2	Unit							
77	Lemari Kotak Kartu Kendali	1	Unit							
78	Line Coat/ Alat Semprot Marka	1	Unit							
79	Loker 12 Pintu Gandeng	4	Unit				1			
80	Mata Bor dan Gerinda	2	Unit							
81	Meja & Kursi bhn Besi	1	Unit							
82	Meja 1 Biro	2	Unit							
83	Meja dan Kursi panjang tunggu	2	Unit							
84	Meja Kantor 1 biro 2 laci	8	Unit							
85	Meja Kerja	27	Unit							
86	Meja kerja 1/2 biro	1	Unit					2	1	
87	Meja kerja Pejabat	2	Unit							
88	Meja kursi tamu	1	Unit					1		
89	Meja kursi Tamu melamine	1	Unit							
90	Meja Kursi Tamu Ruangan Pejabat	1	Unit							
91	Meja Rapat Pejabat	5	Unit							
92	Meja Rapat	9	Unit						1	
93	Meja tulis 1 Biro	1	Unit					1		
94	Meja Tulis	2	Unit							
95	Meja tulis 1/2 Biro	8	Unit							

96	Mesin Bor Listrik Tangan 2-22	1	Unit							
97	Mesin Gambar	1	Unit							
98	Mesin Dongkrak	1	Unit							
99	Mesin Gerinda Tangan	3	Unit							
100	Mesin Gilas	4	Unit							
101	Mesin Hitung Uang	1	Unit							
102	Mesin Ketik elektronik	2	Unit							
103	Mesin Light Druck	1	Unit							
104	Mesin Potong Rumput	13	Unit					1		
105	Mesin Potong Kertas	1	Unit							
106	Mesin Penghancur Kertas	3	Unit							
107	Mesin potong manual / cut off engine	1	Unit							
108	Mesin pompa air dan kelengkapannya(Selang hisap 8" dan Selang buang 2') (jack hamer)	1	Unit							
109	Mobil PMK	5	Unit							
110	Pakaian Tahan Api	7	Unit							
111	Pisau potong besi	2	Unit							
112	Podium	1	Unit							
113	Pipa conduit	1	Unit							
114	Pompa Air	3	Unit							
115	Profometer	1	Unit							
116	Projektor	1	Unit							
117	Radio (Handy Talki)	13	Unit							
118	Radio Caset	1	Unit							
119	Rak Kayu	12	Unit							
120	Rak serba guna	4	Unit			4				
121	Rak Buku Perpustakaan (kayu)	6	Unit							
122	Rak barang di gudang	5	Unit							
123	'Rak Buku/tv/Kembang	8	Unit							

124	Rak Besi Arsip	7	Unit							
125	Scaner	2	Unit							
126	Selang Pemadam	13	Unit							
127	Selang Penyedot Strainer	2	Unit							
128	Sound System	2	Unit							
129	Shelter tenda	17	Unit							
130	Speaker	1	Unit							
131	Stamper	3	Unit							
132	Stoom Walls	1	Unit							
133	Straples Penjilid	2	Unit							
134	Tandu lipat	2	Unit							
135	Tangga Almunium	6	Unit							
136	Tabung Pemadam Kebakaran	7	Unit							
137	Tripood screen	1	Unit							
138	Transever (RIG)	1	Unit							
139	Televisi	2	Unit							
140	Tower Triangle	1	Unit							
141	Telepon	1	Unit							
142	UPS / Stabilizer	2	Unit							
143	Wireless beserta kelengkapannya	1	Unit							
144	Vacum Cleaner	4	Unit							
145	Vibratory Roller	1	Unit							
146	Mesin Semprot Air		Unit			1		1		
147	Mesin Blower		Unit			1		1		
148	Mesin Airalkali		Unit							
149	Tandon Air		Unit						1	
150	Roll O Pck		Unit						2	
151	Scaffolding 1.5 m		Unit	25						
152	Satu set mainan anak		Unit	1						

153	Parabola		Unit	2						
-----	----------	--	------	---	--	--	--	--	--	--

Sumber : Neraca Akhir Tahun DPU Tahun Anggaran 2016

Kondisi aset sebagian besar dalam kondisi baik, untuk aset dalam kondisi rusak berat sudah diusulkan dalam penghapusan aset karena akan membebani pemeliharaan. Sedangkan untuk aset yang masih layak pakai, masih baru atau dalam kondisi baik sangat diperlukan adanya manajemen pengelolaan aset, sehingga asset-asset yang ada dapat terinventaris secara rapi baik dari sisi pemeliharaannya maupun dari sisi administrasi aset.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang didukung dengan anggaran berbasis kinerja, yaitu setiap unit kerja mengelola anggaran untuk mendanai program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, perkembangan APBD dari Tahun 2011 – 2016 dan 2017 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.5.
Perkembangan APBD Dinas Pekerjaan Umum tahun 2011-2016 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang tahun 2017

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi APBD		Belanja Pegawai/BTL	Jumlah Belanja Langsung/BL
			(Rp)	%		
1	2011	57.286.222.000,00	47.423.342.276,00	83%	3.492.431.428,00	43.930.910.848,00
2	2012	89.906.376.000,00	46.391.989.221,00	52%	3.490.955.077,00	42.901.034.144,00
3	2013	112.899.292.000,00	102.068.054.128,00	90%	3.447.459.578,00	98.620.594.550,00
4	2014	58.289.504.000,00	48.856.120.805,00	84%	3.678.378.476,00	45.177.742.329,00
5	2015	61.171.629.000,00	52.431.901.358,00	86%	4.017.037.950,00	48.414.863.408,00
6	2016	90.852.241.000,00			4.484.530.000,00	86.367.711.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	2017	62.706.029.000,00			3.896.897.000,00	58.809.132.000,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPU Kota Magelang

Tabel 2.6
APBD DPU Kota Magelang Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015

No	Tahun	Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Rp)	Urusan Wajib Perumahan (Rp)	Urusan Pilihan (Rp)
1	2011	48.472.337.000	5.210.879.000	-
2	2012	84.197.441.000	2.038.180.000	-
3	2013	106.663.066.000	2.295.869.000	-
4	2014	50.728.045.000	3.326.237.000	-
5	2015	55.851.162.000	1.068.134.000	-

Tabel 2.6
APBD DPU Kota Magelang Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah
Tahun 2011-2015

No	Tahun	Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Rp)	Urusan Wajib Perumahan (Rp)	Urusan Pilihan (Rp)
1	2011	48.472.337.000	5.210.879.000	-
2	2012	84.197.441.000	2.038.180.000	-
3	2013	106.663.066.000	2.295.869.000	-
4	2014	50.728.045.000	3.326.237.000	-
5	2015	55.851.162.000	1.068.134.000	-

Jumlah APBD Dinas Pekerjaan Umum setiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan terutama untuk urusan pekerjaan umum, hanya saja pada tahun 2012 dan 2013 Belanja langsung mengalami peningkatan hampir 100% dibandingkan pada tahun 2011, 2014 dan 2015 karena pada tahun tersebut DPU sedang melaksanakan pembangunan Pasar Rejowinangun yang terbakar pada tahun 2018. Struktur APBD Belanja langsung terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Umum (DAU). Program kegiatan DPU Kota Magelang tahun 2011 sd 2015 tertera seperti pada tabel di bawah ini :

Proyeksi Kebutuhan SDM Dinas Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mempersiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu memproyeksikan kebutuhan pegawai selama 5 tahun dengan mempertimbangkan aspek beban kerja yang diampu pada masing-masing bidang/UPTD/Sekretariat. Kebutuhan pegawai ini dihimpun dari unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan tugas/kegiatan pada bidang-bidang, sekretariat, UPTDserta dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai yang dibutuhkan serta sesuai dengan proyeksi kebutuhan Diklat Pegawai. Proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun ini selain untuk memenuhi kebutuhan pegawai dikarenakan kurangnya personil juga sebagai pengganti pegawai yang memasuki masa pensiun selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Selain kebutuhan pegawai yang sesuai dengan struktur organisasi saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memproyeksikan kebutuhan pegawai bagi UPTD yang menjadi wacana akan dibentuk yaitu UPTD Laboratorium Uji. Seperti halnya dengan UPTD yang lain kebutuhan pegawai pada UPTD baru ini meliputi kebutuhan pejabat struktural maupun pegawai

fungsional yang dibutuhkan. Adapun Proyeksi Kebutuhan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

TABEL 2.5
PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2016 s/d 2021

NAMA JABATAN	ABK	KONDISI PEGAWAI SAAT INI			MUTASI PENSIUN						USULAN KEBUTUHAN PNS s/d 2021	KETERANGAN
		JML PNS	JML CPNS	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5 (=3+4)	6	7	8	9	10	11	12	13
Kepala Dinas Pekerjaan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1. Kepala Sub Bagian Program dan keuangan	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
a. Penyusun Rencana Program	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
b. Penyusun Evaluasi dan Pelaporan	4	2	0	2	0	0	0	0	0	1	3	
c. Bendahara	3	4	0	4	1	0	0	0	0	0	0	
d. Penata Dokumen Keuangan	3	2	1	3	0	0	0	0	1	0	0	
e. Penyusun Laporan Keuangan	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
f. Verifikator Keuangan	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
a. Pengelola Umum dan Kepegawaian	6	4	0	4	1	0	0	0	1	0	5	
b. Pengelola Barang	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
B. Kepala Bidang Bina Marga	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1. Kepala Seksi Jalan dan Jembatan	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
a. Pengolah Data	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	STM Bangunan
b. Pengawas Jalan dan Jembatan	3	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	STM Bangunan

2. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
a. Pengolah Data	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
C. Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Sarjana Teknik Sipil
1. Kepala Seksi Bangunan Gedung	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
a. Pengolah Data	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
b. Pengawas Bangunan dan Gedung	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
c. Pelaksana Teknis Bangunan dan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
2. Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
a. Pengolah Data	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
b. Pengawas Perumahan	5	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	
c. Pelaksana Teknis Perumahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
D. Kepala Bidang Pengairan, Drainase dan Energi Sumber Daya Mineral	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1. Kepala Seksi Pengairan dan Drainase	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
a. Pengolah Data	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
b. Pengawas Pengairan	2	2	0	2	0	0	1	1	0	0	2	
2. Kepala Seksi Energi Sumber Daya Mineral	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
a. Pengolah Data dan Informasi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
b. Surveyor	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
F. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
a. Operator Mesin Pemadam Kebakaran	21	3	0	3	0	0	0	0	0	2	20	
b. Pengemudi Mobil Damkar	21	3	0	3	0	0	0	0	0	0	18	
c. Pranata Pemadam Kebakaran	21	6	0	6	1	0	0	0	0	0	16	
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
a. Pengelola Umum dan Kepegawaian	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Kepala UPTD Alat Berat	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Operator Alat Berat	6	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
a. Pengelola Umum dan Kepegawaian	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
H. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rusunawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Kepala UPTD Rusunawa	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Pengelola Perumahan dan Permukiman	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
a. Pengelola Umum dan Kepegawaian	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
H. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Uji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Kepala UPTD Laboratorium Uji	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
a. Pengelola Laboratorium Uji	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
a. Pengelola Umum dan Kepegawaian	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH	149	65	1	67	6	0	4	2	3	5	99	

Berdasarkan data eksisting dan proyeksi kebutuhan pegawai DPU-PR Kota Magelang dengan mempertimbangkan aspek beban kerja yang diampu pada masing-masing bidang/UPTD/bagian saat ini kekurangan pegawai hampir di semua bidang/bagian. Hal ini disebabkan dalam 5 tahun terakhir banyak pegawai yang mengalami masa pensiun dan tidak diiringi dengan penambahan pegawai baru khususnya yang memiliki kemampuan teknis bidang sipil dan arsitektur. Jumlah proyeksi kebutuhan pegawai keseluruhan 99 orang.

c. Aset yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

Aset merupakan salah satu pendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan baik terkait dengan tugas kedinasan maupun teknis penyelesaian pekerjaan. Aset yang terpelihara dengan baik akan menjadi satu modal pendukung bagi suatu institusi dalam pencapaian tujuan namun aset yang tidak terkelola dengan baik hanya akan menjadi beban bagi institusi tersebut karena setiap aset butuh biaya perawatan yang tidak sedikit. Aset utama pendukung tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Daftar Asset dan Proyeksi Kebutuhan Aset
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	Proyeksi kebutuhan						Ket
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Komputer	17	Unit			3	2	1		Rencana dihapus 6 unit pada tahun 2018
2	Monitor	12	Unit							
3	Printer	28	Unit				2	7		Tahun 2018 dihapus 6 unit, kondisi 2016 rusak semua
4	Notebook / Laptop	23	Unit			3		1	2	Tahun 2006 dihapus 1, tahun 2007 dihapus 3, tahun 2008 dihapus 1

5	LCD Proyektor	1	Unit					1		tahun 2013 dihapus 1
6	Mesin Tulis / Mesin Ketik	9	Unit							
7	AC Sentral	5	Unit						1	
8	AC Split	1	Unit							
9	Filling Cabinet	42	Unit				4			Brother pengadaan tahun 2007 dihapus 4
10	Kendaraan Roda 4	7	Unit							
11	Ruang Sidang/Rapat (daya tampung)	25	Orang							
12	Truck	2	Unit							
13	Pick up	5	Unit							
14	kendaraan roda 2	13	Unit							
15	Breathing Asparatus	3	Unit							
16	Lampu Rotary Merah	7	Unit							
17	Mesin Dalam	4	Unit							
18	Mesin luar uap	1	Unit							
19	Selang 1 1/2	8	Unit							
20	Folding Bed	14	Unit							
21	drum racun api	2	Unit							
22	Alat Kantor PMK : pompa protable 1 unit, selang penyemprot 1 1/2". 2 roll	1	Unit							
23	Almari	24	Unit							
24	Almari/rak buku	2	Unit							
25	Almari 2 Pintu	13	Unit							
26	Almari arsip pintu kaca	5	Unit			2	2			
27	Almari Besi	4	Unit							
28	Almari buku kaca	6	Unit							
29	Almari es	1	Unit							
30	Almari Gambar 8 laci	3	Unit							

31	Almari Kaca 2 pintu	3	Unit							
32	Almari Katalog (kayu)	4	Unit							
33	Backhoe loader	1	Unit							
34	Baju Tahan Api	2	Unit							
35	Bangku Tunggu	1	Unit							
36	Brankas (Tahan Api)	4	Unit							
37	Camera	2	Unit			2				
38	CCTV beserta kelengkapannya	1	Unit							
39	Compresor Breathing Asparatus	1	Unit							
40	Digital Multi Tester	2	Unit							
41	Discussion System	1	Unit							
42	Dispenser	8	Unit							
43	DVD Player	1	Unit							
44	Exhause Fan, Ventilating Fan	1	Unit							
45	Faksimile	1	Unit							
46	Filling Besi	6	Unit							
47	Filling Kabinet 2 laci	3	Unit				1			
48	Filling Kayu	2	Unit							
49	Fire Jacket	10	Unit							
50	Genset Silent	1	Unit							
51	Gerobag Sampah	1	Unit							
52	Gerobag Sorong	5	Unit							
53	Gordyn vertical blind	1	Unit							
54	GPS	3	Unit							
55	Hammer test digital	1	Unit							
56	Hammer test analog	1	Unit							
57	Handycam	1	Unit							
58	Intelegent UPS	2	Unit							
59	Jack hammer	1	Unit							
60	Kabel VGA	1	Unit							

61	Kipas Angin	8	Unit							
62	Komposter Komunal	1	Unit							
63	Kursi	10	Unit							
64	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5	Unit			4	2	4		
65	Kursi Kerja	9	Unit							
66	Kursi Kerja Struktural	38	Unit				2			
67	Kursi Putar/ Kursi Putar Tangan/kursi kerja putar	18	Unit							
68	Kursi Kerja Staf	9	Unit				3			
69	Kursi lipat meja rapat	32	Unit							
70	Kursi Panjang tunggu	6	Unit							
71	Kursi rapat	6	Unit							
72	Kursi Tamu	1	Unit							
73	Kursi Tangan	2	Unit							
74	Kursi susun	50	Unit							
75	Layar / Screen	1	Unit							
76	Lemari Kayu	2	Unit							
77	Lemari Kotak Kartu Kendali	1	Unit							
78	Line Coat/ Alat Semprot Marka	1	Unit							
79	Loker 12 Pintu Gandeng	4	Unit				1			
80	Mata Bor dan Gerinda	2	Unit							
81	Meja & Kursi bhn Besi	1	Unit							
82	Meja 1 Biro	2	Unit							
83	Meja dan Kursi panjang tunggu	2	Unit							
84	Meja Kantor 1 biro 2 laci	8	Unit							
85	Meja Kerja	27	Unit							
86	Meja kerja 1/2 biro	1	Unit					2	1	
87	Meja kerja Pejabat	2	Unit							
88	Meja kursi tamu	1	Unit					1		
89	Meja kursi Tamu melamine	1	Unit							
90	Meja Kursi Tamu Ruangan Pejabat	1	Unit							

91	Meja Rapat Pejabat	5	Unit							
92	Meja Rapat	9	Unit						1	
93	Meja tulis 1 Biro	1	Unit					1		
94	Meja Tulis	2	Unit							
95	Meja tulis 1/2 Biro	8	Unit							
96	Mesin Bor Listrik Tangan 2-22	1	Unit							
97	Mesin Gambar	1	Unit							
98	Mesin Dongkrak	1	Unit							
99	Mesin Gerinda Tangan	3	Unit							
100	Mesin Gilas	4	Unit							
101	Mesin Hitung Uang	1	Unit							
102	Mesin Ketik elektronik	2	Unit							
103	Mesin Light Druck	1	Unit							
104	Mesin Potong Rumput	13	Unit					1		
105	Mesin Potong Kertas	1	Unit							
106	Mesin Penghancur Kertas	3	Unit							
107	Mesin potong manual / cut off engine	1	Unit							
108	Mesin pompa air dan kelengkapannya(Selang hisap 8" dan Selang buang 2') (jack hamer)	1	Unit							
109	Mobil PMK	5	Unit							
110	Pakaian Tahan Api	7	Unit							
111	Pisau potong besi	2	Unit							
112	Podium	1	Unit							
113	Pipa conduit	1	Unit							
114	Pompa Air	3	Unit							
115	Profometer	1	Unit							
116	Projektor	1	Unit							
117	Radio (Handy Talki)	13	Unit							
118	Radio Caset	1	Unit							
119	Rak Kayu	12	Unit							

120	Rak serba guna	4	Unit			4				
121	Rak Buku Perpustakaan (kayu)	6	Unit							
122	Rak barang di gudang	5	Unit							
123	Rak Buku/tv/Kembang	8	Unit							
124	Rak Besi Arsip	7	Unit							
125	Scaner	2	Unit							
126	Selang Pemadam	13	Unit							
127	Selang Penyedot Strainer	2	Unit							
128	Sound System	2	Unit							
129	Shelter tenda	17	Unit							
130	Speaker	1	Unit							
131	Stamper	3	Unit							
132	Stoom Walls	1	Unit							
133	Straples Penjilid	2	Unit							
134	Tandu lipat	2	Unit							
135	Tangga Almunium	6	Unit							
136	Tabung Pemadam Kebakaran	7	Unit							
137	Tripood screen	1	Unit							
138	Transever (RIG)	1	Unit							
139	Televisi	2	Unit							
140	Tower Triangle	1	Unit							
141	Telepon	1	Unit							
142	UPS / Stabilizer	2	Unit							
143	Wireless beserta kelengkapannya	1	Unit							
144	Vacum Cleaner	4	Unit							
145	Vibratory Roller	1	Unit							
146	Mesin Semprot Air		Unit			1		1		
147	Mesin Blower		Unit			1		1		
148	Mesin Airalkali		Unit							
149	Tandon Air		Unit						1	

150	Roll O Pck		Unit						2	
151	Scaffolding 1.5 m		Unit	25						
152	Satu set mainan anak		Unit	1						
153	Parabola		Unit	2						

Sumber : Neraca Akhir Tahun DPU Tahun Anggaran 2015

Kondisi aset sebagian besar dalam kondisi baik, untuk aset dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi (terutama aset-aset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun) sudah diusulkan dalam penghapusan aset karena akan membebani pemeliharaan. Sedangkan untuk aset yang masih layak pakai, masih baru atau dalam kondisi baik sangat diperlukan adanya manajemen pengelolaan asset, sehingga asset-asset yang ada dapat terinventaris secara rapi baik dari sisi pemeliharaannya maupun dari sisi administrasi aset.

2.2. Kinerja Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang mengemban tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum. Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang selama 5 tahun terakhir berhubungan dengan persoalan pekerjaan umum, dan penataan ruang. Indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian indikator kinerja selama 5 tahun terakhir sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Sumber Indikator (IKU / SPM)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Proporsi Panjang Jalan kota Magelang dengan kondisi baik	IKU	98,12 %	98,14 %	98,15 %	98,16 %	98,17 %	75%	80%	85%	88,5%	90%	
2.	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota	SPM	80%	80%	85%	90%	93%	96,37 %	97,76 %	99,2%	99,2%	99,67 %	
3.	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan	SPM	91,52 %	92%	93%	93%	94%	87,51	89,13	93,51	93,51 %	94,27 %	

	selamat dan nyaman												
4.	tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	SPM	95,60	96%	96%	97%	97%	63,92 %	64,38 %	64,83	64,83	65,59	
5.	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	SPM	94%	94%	95%	96%	96%	215%	216%	217%	218%	219%	
6.	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	SPM	60%	60%	60%	60%	60%	58,23 %	58,92 %	59,32	60,36 %	61,12 %	
7.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	IKU	70%	70%	73%	76%	80%	70%	72%	31%	32%	33%	
8.	Panjang jalan dilalui roda 4	IKU	76%	78%	80%	83%	85%	78%	82,35 %	82,35 %	88,23 %	93,92 %	
9.	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	IKU	73%	76%	78%	80%	83%	76,47 %	80%	84%	88,23 %	94,11 %	
10	Sepadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	IKU	45%	50%	53%	55%	60%	45%	50%	58%	59%	60%	
11	Database jalan yang terupdate	IKU	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
12	Tersedianya sistem	SPM	10%	25%	35%	45%	50%	10,26 %	29,53	33,72	44,05 %	48,55 %	

	jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun												
13	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	SPM	78%	80%	83%	84%	85%	85%	84%	84%	84%	85,16%	
14	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter /orang	SPM	79,17%	79,5%	80%	81%	82%	79,50	80,20	80,62%	81,50%	82,30%	
15	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	SPM	90%	91%	92%	93%	94%	95,4%	94,38%	94,32%	94,22%	94%	
16	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak sabanyak 4 Kawasan yaitu GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah	RPJMD	25%	55%	60%	65%	75%	50%	55%	60%	65%	67%	

	Tidar, dan Alun-alun												
17	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	SPM	1%	2%	4%	5%	5%	0,69%	2,69%	4,78%	6,02%	6,16%	
18	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kab/kota	SPM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
19	Tersedianya dokumen RTRW dan dan Perda RTRW 2010 – 2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 – 2020, RTH dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gn. Tidar)		0%	25%	25%	50%	70%	0%	25%	25%	50%	70%	
20	Tersedianya sarana informasi rencana tata ruang wilayah kepada masyarakat		35%	50%	60%	80%	100%	35%	50%	60%	80%	100%	
21	Jumlah ijin lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Kinerja sub bidang infrastruktur jalan sudah membaik hal ini ditunjukkan dengan pencapaian indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 90% artinya dari total 122 km jalan kewenangan kota terdapat 107 km jalan dalam kondisi baik. Jalan yang masih dalam kondisi rusak direncanakan akan ditingkatkan pada periode renstra selanjutnya secara bertahap. Air irigasi masih tersedia dengan lancar ditunjukkan dengan indikator sebesar 85%, dipasok dari Kali Manggis dan Kali Bening. Namun yang perlu menjadi perhatian yaitu berubahnya fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase disebabkan banyaknya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi pertanian yang menyebabkan kondisi air irigasi dimungkinkan tidak sampai ke petak sawah yang terakhir. Kondisi saluran

drainase perkotaan saat ini belum sepenuhnya mampu menampung limpasan air jika hujan deras terjadi sehingga terkadang muncul genangan di beberapa tempat. Menurunnya fungsi saluran drainase disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi yang sudah tua, saluran tertutup material tanah/ pasir dan sampah dan bencana alam(tanah amblas/longsor).

Beberapa indikator yang belum memenuhi target yaitu :

1. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

Sistem drainase tidak dapat berdiri sendiri dan selalu berhubungan dengan bidang infrastruktur lainnya seperti perumahan, jalan perkotaan dan pengembangan kawasan. Penyelesaian permasalahan genangan di suatu kawasan bersifat lintas bidang dan lintas kewilayahan, sehingga koordinasi dan sinkronisasi penanganan perlu dilakukan agar hasilnya optimal. Pembangunan drainase bertujuan untuk mengurangi terjadinya banjir atau genangan di beberapa titik Kawasan perkotaan yang dimulai dari saluran primer-sekunder-tersier.

Pada tahun 2015 melalui Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong telah dilaksanakan peningkatan saluran drainase yaitu mengganti saluran lama dengan saluran air pracetak U-Ditch di kawasan Jalan ABS Prawirodirjo, kawasan jalan Senopati, Kawasan jalan cempaka dan Kawasan Timur Pasar Rejowinangun. Sedangkan pada tahun 2016 ada perbaikan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Kalijogo, Rehabilitasi / Peningkatan saluran drainase Jalan Perintis Kemerdekaan, Sampai dengan 2015 capaian kinerja indikator ini sebesar 48,55% melampaui target yang ditetapkan sebesar 48% sehingga persentase pencapaiannya 101,15%. Jika dibandingkan dengan capaian 44% pada tahun 2014 maka capaian kinerja mengalami peningkatan 4,88%, sedangkan bila dibandingkan dengan 50% target SPM Kementerian Pusat maka Indikator ini mencapai 97,1% atau belum tercapai. Belum tercapainya indikator ini karena terbatasnya pagu anggaran. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Magelang mengajukan proposal untuk Peningkatan Saluran Drainase Jalan Beringin IV melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk dilaksanakan di Tahun 2017.

2. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak sabanyak 4 Kawasan yaitu GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah Tidar, dan Alun-alun

Pengembangan infrastruktur kawasan strategis diperlukan untuk menunjang Kota Magelang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, serta untuk menumbuhkan kembali perekonomian baik bagi pelaku bisnis, pedagang, maupun masyarakat pada *umumnya*. Pada tahun 2015 sudah dilaksanakan pengembangan infrastruktur di kawasan Stadion dan kawasan lembah tidar, sehingga indikator yang dicapai 67%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 65% ada peningkatan sebesar 2% dan jika dibandingkan dengan target RPJMD 2015 sebesar 75% indikator ini tidak tercapai atau capaian kinerjanya hanya mencapai 89,33%.

Tidak tercapainya indikator ini karena pada tahun 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Magelang memprioritaskan pembangunan Pasar Rejowinangun yang terbakar pada tahun 2008 sehingga pengembangan kawasan GOR dan sentra ekonomi lembah tidar ditunda pelaksanaannya. Selain itu, pembangunan sport center dan penyelesaian stadion membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sumber pendanaan untuk pembangunan stadion selain dari DAU juga diusahakan melalui pengajuan proposal lewat dana APBN dan Bantuan Keuangan Provinsi. Beberapa kegiatan yang belum terlaksana untuk mencapai indikator Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis adalah pembangunan sport center yang terdiri dari pembangunan Lapangan tenis, kolam renang, rehab GOR Samapta dan stadion Moch Soebroto.

2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

Memperhatikan tugas fungsi dan struktur organisasi dan menelaah ketersediaan sumber daya yang ada serta melihat review kinerja pelayanan DPU Tahun 2011-2015, maka selama jangka lima tahun ke depan DPUPR harus memperhatikan seluruh dinamika, tantangan serta peluang baik secara internal maupun eksternal. Hal ini sangat penting untuk pencapaian target dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. DPUPR perlu terus berbenah dan memosisikan diri sebagai organisasi teknis melayani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Tantangannya sebagai berikut :

- Tantangan yang dihadapi dalam urusan pekerjaan umum khususnya infrastruktur jalan dari analisis terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah yaitu semakin tingginya pertumbuhan volume kendaraan dan meningkatnya pelanggaran muatan memberi tantangan bagaimana Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang harus menyiapkan jaringan jalan baru dan prasarana jalan yang berkualitas.

- Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan sehingga DPUPR Kota Magelang harus menyiapkan bangunan pelengkap jalan seperti trotoar dan mendukung disabilitas.
- Tantangan yang dihadapi dalam urusan pekerjaan umum khususnya infrastruktur irigasi dari analisis terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah yaitu semakin banyaknya perubahan fungsi saluran irigasi dikarenakan perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian memberi tantangan bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang harus menyiapkan jaringan irigasi yang berkualitas supaya debit air sampai ke petak terakhir bagi sawah yang membutuhkan air.
- Tantangan lainnya yaitu adanya perubahan iklim dan pemanasan global menyebabkan curah hujan yang tinggi sehingga jika terjadi hujan deras memberi debit air bertambah banyak dan terkadang muncul genangan memberikan tantangan bagaimana DPU Kota Magelang harus menyiapkan master plan drainase yang baik dan prasarana drainase yang berkualitas.
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang masih rendah.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

- Masih banyak terdapatnya permukiman peninggalan belanda dan kampung lama yang di konservasi untuk cagar budaya.
- Berkembangnya kajian dan teknologi baru terkait pembangunan sarana dan prasarana.
- Adanya program Gubernur Provinsi Jawa Tengah bahwa sampai dengan tahun 2018 tidak ada lagi jalan yang berlubang.
- Meningkatnya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur
- Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program swasembada pangan yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai sektor pengungkit prioritas pembangunan dan perekonomian.
- Adanya teknologi penanganan konstruksi drainase berupa beton pre-cvast (U-Ditch dan Box Culvert)

- Adanya alokasi anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah untuk bantuan keuangan khusus sarana dan prasarana bidang infrastruktur wilayah Kabupaten/Kota.
- Bertambahnya luas wilayah Kota Magelang seluas 18,54 ha

2.3 Proyeksi ke Depan dan Kondisi yang Diinginkan DPU PR

Kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana, dengan demikian menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk hasil infrastruktur pembangunan yang berkualitas serta dapat diterapkan. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, maka dalam lima tahun kedepan diupayakan untuk mengikutsertakan personil dalam bintek dan diklat, khususnya diklat bagi pengembangan kapasitas karyawan. Sedangkan secara mandiri, badan perencanaan juga harus selalu menyelenggarakan workshop yang diikuti semua personil. Selain workshop juga penting untuk dilakukan pelatihan peningkatan motivasi kerja.

Untuk menjaga suasana kerja yang kondusif, maka membangun kebersamaan akan selalu digaungkan secara kontinyu dan konsisten. Salah satu cara adalah melalui penyelenggaraan pelatihan dan out-bond bagi semua personil. Sedangkan dalam menjaga berkembangnya kreativitas dan inovasi personil, maka suasana yang lebih egaliter akan selalu dijaga di lembaga perencana ini.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana kerja, kondisi yang ada saat ini harus dipertahankan dan ditingkatkan, dan yang menjadi syarat mutlak adalah ketersediaan sarana komputer. Untuk ketersediaan sarana komputer, 1 (satu) personil dengan minimal 1 (satu) komputer adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi di badan perencanaan. Dukungan jaringan internet dengan kapasitas memadai harus ditingkatkan dalam lima tahun ke depan. Selain itu, dalam lima tahun kedepan akan diperlukan keberadaan server, sehingga semua komputer di DPU PR akan terhubung dan terkoneksi.

Untuk menambah wawasan dan referensi bagi personil DPU PR, maka dalam lima tahun kedepan koleksi buku-buku referensi akan dikelola lebih baik. Selain itu penambahan koleksi buku referensi juga secara bertahap akan dilakukan.

Dokumen rencana yang berkualitas menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan DPU PR dalam menjalankan amanahnya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dari uraian diatas, maka akan membawa pada kesiapan DPU PR dalam menghasilkan infrastruktur yang mampu menjawab tantangan dalam mengembangkan Kota Magelang, serta mampu melayani kebutuhan pembangunan

daerah bagi masyarakat. Agar konsisten dalam menjaga kualitas produk rencana, maka 4 (empat) prinsip yang harus dipegang adalah: keterkaitan, konsistensi, kedalaman-kelengkapan, serta keterukuran. Sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah dari bawah (bottom-up), dari atas (top-down), teknokratik, politik dan inovasi.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka langkah lanjut yang ditempuh adalah:

1. Menjaga kondusifitas lingkungan kerja;
2. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja;
4. Menyusun prosedur pelaksanaan pekerjaan melalui SOP yang baku;
5. Menjaga dan meningkatkan sarana dan prasarana kerja;
7. Peningkatan update dan keaktifan website DPU PR Kota Magelang sebagai sarana an informasi publik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang merupakan hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas perencanaan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menentukan isu-isu strategis dimulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu juga perlu dikenali faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mungkin dijumpai dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Magelang. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah hasil telaahan terhadap Renstra Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, RTRWK serta KLHS.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2016-2021, adalah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 dan merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Rencana strategis lima tahun sebelumnya menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun demikian juga masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari faktor internal dan eksternal OPD. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Identifikasi Permasalahan dan kendala didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

1. Keterbatasan tenaga administrasi, teknis lapangan dan tenaga pengelola kegiatan yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi, sebagai bahan dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan.
3. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
4. Belum optimalnya sistem pemanfaatan teknologi informasi serta lemahnya sistem pengolahan data dan kearsipan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Belum sepenuhnya aparatur/SDM patuh terhadap peraturan perundang-undangan
6. Kurangnya dukungan data dan informasi bagi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
7. Belum optimalnya koordinasi antar OPD berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Bidang Cipta Karya

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin dan *difable* di perkotaan
2. Adanya aturan/regulasi yang tumpang tindih menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan
3. Kurangnya dukungan data dan informasi bagi penguatan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
4. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait dengan pelaksanaan kegiatan di bidang cipta karya dan perumahan.
5. Kekurangsiapan dalam mengantisipasi kecepatan dan dinamika pertumbuhan fisik dan fungsional kawasan perkotaan, sehingga kawasan kumuh tumbuh sejalan dengan berkembangnya pusat-pusat kegiatan ekonomi.
6. Keterbatasan staf yang produktif
7. Keterbatasan staf yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa

3. Bidang Bina Marga dan Pengairan

1. Keterbatasan staf yang produktif
2. Keterbatasan staf yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
3. Kurangnya bangunan pelengkap jalan di beberapa ruas jalan.
4. Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai, terutama yang bisa diakses oleh penyandang cacat.
5. Masih perlunya penambahan jaringan jalan antar wilayah di Kota Magelang

6. Masih perlunya peningkatan maupun penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat karena merupakan bagian dari lalu lintas
7. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait pelaksanaan di bidang Bina Marga.
8. Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah.
9. Usia bangunan yang sudah tua menyebabkan saluran drainase tidak cukup menampung limpasan air saat terjadi hujan yang deras
10. Semakin banyaknya perubahan fungsi saluran irigasi dikarenakan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
11. Semakin tingginya curah hujan yang berpotensi menyebabkan genangan dan banjir.
12. Adanya kejadian bencana alam longsor, amblas yang mengancam konstruksi saluran irigasi dan drainase.
13. Semakin banyaknya pemanfaatan lahan irigasi yang tidak sesuai peruntukannya;
14. Masih kurangnya proporsi dimensi saluran drainase dengan debit air yang akan ditampung.
15. Masih kurangnya jumlah saluran cross drain (shipon) pembuang drainase ;
16. Kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan irigasi dan drainase;
17. Peraturan perundang-undangan yang sering berubah sehingga menyulitkan pelaksanaan perizinan ESDM;
18. Masih kurangnya penggunaan peralatan hemat energi di lingkungan pemerintah sehingga belum bisa mengurangi anggaran pemanfaatan energi dan belum bisa menjadi contoh bagi perkantoran swasta.

4. Bidang Penataan Ruang

1. Perlu percepatan penyusunan Perda RDTRK dengan melakukan peninjauan kembali Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang.
2. Perlu dibuat Perda tentang reklame, untuk mengatur perijinan mendirikan reklame
3. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum terincinya tata ruang kota Magelang.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat yang masih kurang.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagai bahan penyusunan Rancangan Renstra OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang dalam melaksanakan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang berkewajiban melaksanakan sesuai urusan/kewenangannya Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas sebagaimana matrik penjabaran Visi Misi Kepala Daerah terpilih dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam RPJM Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang bertanggungjawab melaksanakan Misi Kepala Daerah terpilih baik sebagai OPD penanggung jawab maupun OPD pendukung. Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Walikota Magelang dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota Magelang.

1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi Pemerintah Daerah Kota Magelang merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2015-2019, maka Visi Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut : **“TERWUJUDNYA KOTA MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**

Terhadap Visi Jangka Menengah Kota Magelang tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sebagai Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan

Pengaturan, Pembinaan dan pengawasan urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Pemerintah, agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan yaitu:

No	Visi Walikota	Peran DPU PR Kota Magelang
1	TERWUJUDNYA KOTA MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA dimaknai sebagai Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan dan sektor pendidikan	Melalui Bidang Bina Marga dan Pengairan, Bidang Cipta karya dan Bidang Penataan Ruang dan UPTD alat Berat diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi “lebih modern” melalui kegiatan-kegiatan yang dapat membangkitkan minat masyarakat serta kondisi infrastruktur lebih
2.	KOTA MAGELANG YANG MODERN dimaknai sebagai suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada.	baik, sehingga masyarakatnya akan maju dan makmur dan penataan ruang kota yang dapat difungsikan pada sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan untuk mendukung Kota Magelang sebagai Kota Jasa.
3.	KOTA MAGELANG YANG CERDAS dimaknai sebagai Kota cerdas terwujud dalam kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi, dan dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah	Melalui Seluruh Bidang dan UPTD Alat Berat yang ada diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi “lebih maju” melalui kegiatan-kegiatan yang mengikutkan masyarakat sehingga menjadi motor penggerak pembangunan.
4.	YANG DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA dimaknai sebagai Perwujudan kota sejahtera dicapai	Melalui seluruh Bidang diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian

	<p>melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat melalui (1) optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri</p>	<p>kondisi masyarakat yang mandiri, sejahtera, untuk menyongsong peradaban baru yang maju, tinggi dan demokratis, serta toleran.</p>
5.	<p>YANG DILANDASI MASYARAKAT RELIGIUS dimaknai sebagai masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada Ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah</p>	

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Dari kelima Misi Pemerintah Kota Magelang tersebut di atas, maka misi ketiga adalah misi yang harus di emban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang. Misi ketiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Sebagai Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum, berperan agar infrastruktur di Kota Magelang dilaksanakan dengan memperhatikan tata ruang wilayah, kelestarian lingkungan dalam kondisi yang mantap melalui :

- Perwujudan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pekerjaan umum untuk mengurangi kesenjangan wilayah yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, olahraga, pariwisata, distribusi lalu lintas barang, ketahanan pangan.
- Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang sesuai rasio kebutuhan masyarakat
- Pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat dan berkelanjutan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
MISI 3: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas	menurunnya kesenjangan wilayah	Prosentase kecukupan sarana prasarana sesuai rasio kebutuhan penduduk per kecamatan

kesejahteraan masyarakat			
	Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkelanjutan dan konsisten	Tata ruang wilayah yang konsisten	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan
			Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan perjumlah bangunan dan reklame yang belum ber-IMB

3. Program Pembangunan :

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2016 – 2021, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang berdasarkan visi, misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

MISI 3: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

I. Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
7. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
8. Program Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong
9. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

10. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
11. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

II. Urusan Penataan Ruang

1. Program Pemanfaatan Ruang
2. Program Perencanaan tata ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tabel 3.1.
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPU PR-PR Kota
 Magelang
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil
 Walikota Terpilih

Visi Kota Magelang : TERWUJUDNYA KOTA MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS				
N o	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi ke 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat			
	Program – program pada DPU PR-OR Kota Magelang			
I	Urusan Pekerjaan Umum			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belum sepenuhnya aparatur/SDM patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	Masih rendahnya aparatur/SDM yang ingin memahami peraturan perundang-undangan	Kemajuan bidang teknologi komunikasi dan informasi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belum optimalnya aset yang dikelola	Keterbatasan anggaran dan SDM	Kebutuhan akan kualitas sarpras yang

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	oleh dinas, diperlukan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang		memadai semakin tinggi seiring perkembangan ekonomi masyarakat
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi, sebagai bahan dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia, data dasar belum sepenuhnya tersedia dan kurang valid	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Monev
5	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Masih perlunya penambahan jaringan jalan antar wilayah di Kota Magelang.	Terkendala masalah kepemilikan aset karena bukan milik Pemerintah Kota Magelang.	Partisipasi masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur tinggi
6	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Masih perlunya peningkatan maupun penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyanggah cacat karena merupakan bagian dari lalu lintas	Lebar jalan yang tidak terlalu luas sehingga tidak semua ruas jalan dapat dibangun trotoar	Kebutuhan akan kualitas sarpras yang memadai semakin tinggi seiring perkembangan ekonomi masyarakat
7	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Usia bangunan yang sudah tua menyebabkan saluran drainase tidak cukup menampung limpasan air saat terjadi hujan yang deras.	Keterbatasan anggaran karena peningkatan saluran drainase dengan sistem pre cast u-ditch membutuhkan anggaran yang besar.	Tuntutan pengelolaan drainase yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengelolaan lingkungan
8	Program Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			

9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Semakin banyaknya perubahan fungsi saluran irigasi dikarenakan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian	Sempadan irigasi banyak beralih fungsi lahan menjadi lahan terbangun.	Penataan ruang berbasis lingkungan hidup semakin digalakkan yang melindungi fungsi lindung kawasan khususnya sempadan sungai atau saluran irigasi dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan
11	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah	Keterbatasan anggaran daerah	Program pro rakyat semakin banyak dilaksanakan, dan semakin banyak masyarakat yang mengawasi berjalannya program tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program
12	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah	Keterbatasan anggaran daerah	Program pro rakyat semakin banyak dilaksanakan, dan semakin banyak masyarakat yang mengawasi berjalannya program tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan

				n efektivitas program
I	Urusan Penataan Ruang			
1	Program Pemanfaatan Ruang	Belum selesainya pembahasan Perda tentang RDTRK	Rumitnya prosedur dan komunikasi politis yang harus dilakukan	Komitmen dan etos kerja tinggi cukup memberikan dorongan kecepatan penanganan
		Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	Keterbatasan lahan dan anggaran untuk pengembangan perumahan baru yang bisa diakses oleh masyarakat menengah kebawah dan dekat dengan sumber kehidupan mereka	Kebijakan pemerintah semakin mendorong berdirinya perumahan vertikal yang terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPU PR-PR Kota Magelang yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan 4 kementerian yaitu : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ATR, Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra ke dua kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun

yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Telaahan Visi Misi Walikota Magelang terpilih, Permasalahan di seluruh Misi
dan Faktor Penanganannya (Misi 3)

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
1.	KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS	1,2,3,4	Program pengembangan daya saing daerah berbasis potensi lokal	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih perlunya penambahan jaringan jalan antar wilayah di Kota Magelang. - Masih perlunya peningkatan maupun penyediaan fasilitas pejalan kaki dan difabel 	<ul style="list-style-type: none"> - Terkendala masalah kepemilikan aset karena bukan milik Pemerintah Kota Magelang. - Lebar jalan yang tidak terlalu luas sehingga tidak semua ruas jalan dapat dibangun trotoar 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan akan kualitas sarpras yang memadai semakin tinggi seiring perkembangan ekonomi masyarakat - Kebutuhan akan kualitas sarpras yang memadai semakin tinggi seiring perkembangan ekonomi masyarakat
				Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen pimpinan dan telah dimasukkan ke dalam rancangan renstra

				Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong	- Usia bangunan yang sudah tua menyebabkan saluran drainase tidak cukup menampung limpasan air saat terjadi hujan yang deras.	- Keterbatasan anggaran karena peningkatan saluran drainase dengan sistem pre cast u-ditch membutuhkan anggaran yang besar.	- Tuntutan pengelolaan drainase yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengelolaan lingkungan
2.	SEJAHTERA	2, 3, 4	Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan	Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan	- Masih ada ruas jalan yang dalam keadaan rusak	- Identifikasi asset jalan antara jalan kota atau jalan lingkungan yang masih tumpang tindih	- Dukungan anggaran dan merupakan prioritas nasional
			Program penguatan pertumbuhan ekonomi	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	- Belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi	- Terkendala asset yang bukan milik pemkot	Dukungan anggaran dari pusat dan merupakan prioritas nasional

3.	RELIGIUS	2, 5	Program masyarakat religius menuju masyarakat madani	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	- Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.	- Keterbatasan anggaran Daerah	Komitmen pimpinan dan telah dimasukkan ke dalam rancangan renstra
----	----------	------	--	---	--	--------------------------------	---

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPU PR PR yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dari kajian terhadap Renstra Kemen PUPR dan Renstra Provinsi Jawa Tengah Maka permasalahan pelayanan DPU PR PR Kota Magelang beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya sebagai berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan DPU PR PR Kota Magelang berdasarkan Sasaran Renstra Kemen PUPR beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Kemen PU	Permasalahan Pelayanan DPU PR PR Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah	Pembangunan jalan penghubung dan trotoar belum dapat dituntaskan sesuai target SPM yaitu 100%.	Pembangunan jalan penghubung terkendala dengan status kepemilikan Aset.	Adanya Dukungan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
2	Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi	Semakin banyaknya perubahan fungsi saluran irigasi	Perubahan lahan fungsi pertanian menjadi non pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya sumber air irigasi yang mendukung pertanian berkelanjutan - Penataan ruang berbasis lingkungan hidup semakin digalakkan yang melindungi fungsi lindung kawasan khususnya sempadan sungai atau saluran irigasi

No	Sasaran Jangka Menengah Kemen PU	Permasalahan Pelayanan DPU PR PR Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing	Belum terselesaikannya masalah kerusakan jalan dan kemacetan di ruas jalan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat lahan yang cukup untuk pelebaran jalan sehingga perlu pembebasan lahan - Sebagian kelas jalan yang rusak merupakan kewenangan pusat 	Adanya komitmen dan koordinasi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kondisi jalan yang mantap
4	Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak	Belum optimalnya penanganan masalah air bersih, sanitasi, permukiman kumuh dan pengurangan rumah tidak layak huni.	<ul style="list-style-type: none"> - Terkendala oleh aturan perundang-undangan - Terkendala aset - Terbatasnya lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran dari kementerian pusat. - Adanya kebijakan dari Pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk mencapai 100% pelayanan air bersih, 0 % kawasan kumuh dan 100% pelayanan sanitasi
5	Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif,	Kurangnya tenaga ahli bidang teknik sipil dan arsitektur	Dalam 5 tahun terakhir tidak ada tenaga teknis/ahli yang ditempatkan di dinas teknis serta tiap tahun selalu ada pegawai yang pensiun	<ul style="list-style-type: none"> -Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam melayani masyarakat - Sumber daya manusia yang ada dapat dioptimalkan

No	Sasaran Jangka Menengah Kemen PU	Permasalahan Pelayanan DPU PR PR Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	efisien, transparan dan akuntabel			

Demikian pula halnya dengan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, DPU PR PR Kota Magelang juga menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan DPU PR PR Kota Magelang Berdasarkan Sasaran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, Dinas PSDA Jawa Tengah, Dinas Ciptakaru Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan DPU PR PR Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan	Masih perlunya peningkatan maupun penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki dan difabilitas	Lebar jalan yang tidak terlalu luas sehingga tidak semua ruas jalan dapat dibangun trotoar	Kebutuhan akan kualitas sarpras yang memadai seiring dengan perkembangan masyarakat.
2	Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan untuk melayani pertumbuhan lalu lintas	Masih perlunya optimalisasi pengelolaan sarana prasarana jalan dan jembatan	- Keterbatasan lahan untuk penyediaan jalan. - Belum adanya Laboratorium Pekerjaan Umum	- Ketersediaan anggaran yang cukup - Ketersediaan sarpras yang cukup memadai
3	Terlaksananya pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pengurangan luas	Usia bangunan yang sudah tua menyebabkan saluran drainase	- Keterbatasan anggaran karena peningkatan	- Tuntutan pengelolaan drainase yang berkelanjutan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan DPU PR PR Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	rawan genangan serta sistem pengendalian Banjir	tidak cukup menampung limpasan air saat terjadi hujan yang deras;	saluran drainase dengan sistem pre cast u-ditch membutuhkan anggaran yang besar.	dan melibatkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengelolaan lingkungan
4	Terlaksananya pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Semakin banyaknya perubahan fungsi saluran irigasi	- Perubahan lahan fungsi pertanian menjadi non pertanian	- Adanya sumber air irigasi yang mendukung pertanian berkelanjutan
5	Terwujudnya permukiman yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	Belum optimalnya penanganan masalah air bersih, sanitasi, permukiman kumuh dan pengurangan rumah tidak layak huni.	- Terkendala oleh aturan perundang-undangan - Terkendala aset - Terbatasnya lahan	- Dukungan anggaran dari kementerian pusat. - Adanya kebijakan dari Pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk mencapai 100% pelayanan air bersih, 0 % kawasan kumuh dan 100% pelayanan sanitasi
6	Terwujudnya perumahan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	Penyediaan perumahan yang terkendala oleh aturan.	Terkendala kepemilikan aset, karena bukan milik pribadi/perorangan	Dukungan anggaran, komitmen dan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk pemenuhan perumahan yang layak

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Struktur Tata Ruang

Rencana Struktur Ruang Daerah terdiri atas:

- a. Penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dan mampu meningkatkan peran dan fungsi daerah menjadi Pusat Kegiatan Wilayah di Purwomanggung;
- b. Pengembangan dan peningkatan akses, serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Daerah yang merata dan berhierarki guna meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah
- c. Pengembangan sistem sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan sistem regional, provinsi, dan nasional
- d. Pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah meliputi :

3.4.2. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Magelang

Rencana Pola Ruang Daerah terdiri atas:

1. Kawasan Lindung

- a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- b. Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup

2. Kawasan Budidaya

- a. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- b. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup

3. Kawasan Strategis Wilayah Daerah

1. Menetapkan kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berpengaruh pada fungsi lindung

2. Mengkoordinasikan penataan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus kawasan pertahanan negara meliputi Kawasan Akademi Militer (AKMIL), Kawasan Sekolah Calon Bintara (SECABA), Kawasan Komando Distrik Militer (KODIM) dan Resimen Induk Daerah Militer (RINDAM) IV Diponegoro, dan Kawasan Batalyon, Artileri Medan (Yon ARMED) 11.
3. Menetapkan kawasan strategis Daerah dengan fungsi pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari Kawasan Alun-alun, Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar, Kawasan Sidotopo, Kawasan Gedung Olahraga (GOR) Samapta, Kawasan Sukarno-Hatta, dan Kawasan Kebonpolo;

3.4.3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Magelang

1. Rencana sistem perkotaan

a. Pusat pelayanan kota terdiri dari :

Bagian Wilayah Kota (BWK) I merupakan pusat kota dengan fungsi dan arah pengembangan utama sebagai kawasan yang mewadahi kegiatan perkotaan, dengan karakteristik kegiatan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala kota, rekreasi wisata perkotaan yang terdapat di sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, dan sebagian Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, yaitu Kawasan Alun-alun

b. Subpusat pelayanan kota terdiri dari :

- 1). subpusat pelayanan kota terdapat di pusat BWK II yang merupakan wilayah konsentrasi kegiatan permukiman, pendidikan tinggi dan militer meliputi Kelurahan Wates dan Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, yaitu Kawasan Kebonpolo
- 2). Subpusat pelayanan kota terdapat di pusat BWK III dengan pengembangan dan pemanfaatan ruang sebagai kawasan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian alam, pendidikan militer meliputi Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah dan Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, yaitu Kawasan Kyai Langgeng
- 3). Subpusat pelayanan kota terdapat di pusat BWK IV sebagai kawasan pusat pemerintahan, industri kecil dan menengah, simpul pergerakan barang dan jasa orang, meliputi Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, yaitu Kawasan Sukarno – Hatta

- 4). Subpusat pelayanan kota terdapat di pusat BWK V dengan fungsi dan arah pengembangan sebagai kawasan olahraga dan rekreasi skala kota, pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, yaitu Kawasan Sidotopo

c. Pusat lingkungan

Mempunyai cakupan pelayanan skala lingkungan wilayah daerah yang dikembangkan pada masing-masing BWK

2. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Daerah

a. Rencana sistem prasarana utama

1). Rencana sistem jaringan prasarana transportasi darat

- a). Rencana sistem jaringan pelayanan kereta api yang merupakan jaringan kereta api regional Semarang – Magelang – Yogyakarta

- b). Rencana sistem jaringan jalan

- Pengembangan jaringan jalan berdasarkan sistem
 - jalan arteri primer dan sekunder; meliputi :
 - Ruas jalan arteri primer antara Semarang (PKN) – Magelang (PKW) – Yogyakarta (PKN) : Jl Jendral A Yani – Jl Urip Sumoharjo – Jl Soekarno Hatta;
 - Penurunan sistem arteri primer yaitu Jl Jend A Yani – Jl Pemuda – Jl Jend Sudirman.
 - Pengembangan ruas jalan lingkaran timur sebagai arteri primer yang melewati rute di wilayah Kabupaten Magelang dan terintegrasi dengan jaringan regional, provinsi dan Nasional
 - jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
 - jalan lokal primer dan lokal sekunder; dan
 - jalan lingkungan sekunder
- pengembangan lokasi dan kelas pelayanan terminal
 - Terminal Tipe A yaitu Terminal Tidar di Kelurahan Tidar Utara (BWK IV);
 - Terminal Tipe C yaitu Terminal Kawasan Kebonpolo (BWK II), Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo (BWKI), Terminal Kawasan Canguk (IV), Terminal Kawasan Sambung (BWK V), Terminal Kawasan Shopping Center

(BWK I), Terminal Kawasan Jalan Jenderal Sudirman (BWK IV), dan Terminal Kawasan Jalan Kalimas (BWK V); dan

➤ Terminal Angkutan Barang berada di Jalan Sukarno-Hatta Kelurahan Tidar Utara (BWK IV)

- pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum;
- pengembangan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA)

b. Rencana sistem prasarana lainnya

- 1). rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- 2). rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air;
- 3). rencana sistem jaringan prasarana energi; dan
- 4). rencana infrastruktur perkotaan.

Sedangkan, mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan juga dokumen RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031, potensi pengembangan wilayah Kota Magelang pada masa mendatang adalah :

1. Kawasan Sidotopo sebagai pusat pelayanan pendidikan dan perdagangan jasa
2. Kawasan Soekarno Hatta sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan
3. Kawasan Alun-alun sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran
4. Kawasan Kebonpolo
5. Kawasan GOR Samapta sebagai pusat pelayanan rekreasi dan olahraga
6. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan
7. Kawasan Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagai kawasan pusat pelayanan rekreasi dan olahraga.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang tetap mengacu pada penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar Wilayah Daerah, serta keserasian antar sektor. Sesuai dengan rencana kebijakan RTRW Kota Magelang, pengembangan struktur ruang Daerah meliputi pengembangan jaringan jalan, pengembangan jaringan irigasi, pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, pengembangan prasarana

air minum, pengembangan prasarana air limbah, pengembangan prasarana drainase, pengembangan kawasan peruntukan perumahan dan permukiman, pengembangan jalur pejalan kaki, pengembangan pariwisata, pengembangan perdagangan jasa, dan pengembangan kawasan olahraga.

3.4.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang serta pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor pendorong dan penghambat terhadap pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sebagaimana terdapat pada.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait tugas dan fungsi DPU PR PR Kota Magelang	Permasalahan Pelayanan DPU PR PR Kota Magelang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat (Pasal 109)	Belum sepenuhnya aparatur/SDM patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	Masih rendahnya aparatur/SDM yang ingin memahami peraturan perundang-undangan	Kemajuan bidang teknologi komunikasi dan informasi
		Belum optimalnya aset yang dikelola oleh dinas, diperlukan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang	Keterbatasan anggaran dan SDM	Kebutuhan akan kualitas sarpras yang memadai semakin tinggi seiring perkembangan ekonomi masyarakat
		Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi, sebagai bahan dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia, data dasar belum sepenuhnya tersedia dan kurang valid	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Monev

Rencana pengembangan jaringan jalan (Pasal 9, 10, 23)	Masih perlunya penambahan jaringan jalan antar wilayah di Kota Magelang.	Terkendala masalah kepemilikan aset karena bukan milik Pemerintah Kota Magelang.	Partisipasi masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur tinggi
Pengembangan jalur pejalan kaki (Pasal 42)	Masih perlunya peningkatan maupun penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat karena merupakan bagian dari lalu lintas	Lebar jalan yang tidak terlalu luas sehingga tidak semua ruas jalan dapat dibangun trotoar	Kebutuhan akan kualitas sarpras yang memadai semakin tinggi seiring perkembangan ekonomi masyarakat
Pengembangan drainase(Pasal 40)	Usia bangunan yang sudah tua menyebabkan saluran drainase tidak cukup menampung limpasan air saat terjadi hujan yang deras.	Keterbatasan anggaran karena peningkatan saluran drainase dengan sistem pre cast u-ditch membutuhkan anggaran yang besar.	Tuntutan pengelolaan drainase yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengelolaan lingkungan
Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan (pasal 37)	Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah	Keterbatasan anggaran daerah	Program pro rakyat semakin banyak dilaksanakan, dan semakin banyak masyarakat yang mengawasi berjalannya program

				tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program
	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air (Pasal 31)	Semakin banyaknya perubahan fungsi saluran irigasi dikarenakan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian	Sempadan irigasi banyak beralih fungsi lahan menjadi lahan terbangun.	Penataan ruang berbasis lingkungan hidup semakin digalakkan yang melindungi fungsi lindung kawasan khususnya sempadan sungai atau saluran irigasi dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan

3.4.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

Tabel 3.7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan perangkat daerah	Tindak lanjut untuk perumusan program dan kegiatan
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Pembangunan jalan dan jembatan harus dilakukan dengan: 1. Upaya peningkatan fungsi resapan air melalui penanaman pohon dan pembuatan drainase di koridor jalan.	Program pembangunan saluran drainase, dan program rehabilitasi/ peningkatan saluran drainase	- Normalisasi saluran air dan sungai - Pembuatan saluran air untuk mengalirkan air agar tidak mengenai lingkungan dan badan jalan
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	2. Memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang (pengendalian)	Pembangunan jalan dan jembatan, dan program peningkatan jalan dan jembatan	- Bagian perencanaan teknis dilengkapi dengan kajian lingkungan - Penghijauan di sepanjang koridor jalan dengan memperhatikan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Program pengembangan wilayah strategi dan cepat tumbuh harus memperhatikan :	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	- Perijinan dan non perijinan harus mematuhi perundang-undangan
5.	Perubahan iklim			

6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	1. Perijinan dan non perijinan harus mematuhi perundang-undangan 2. Memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan melalui penyediaan RTH kawasan minimal 20 %		<ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan - Perencanaan teknis dilengkapi dengan kajian lingkungan - Penyediaan RTH kawasan minimal 20 %
----	---	---	--	---

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan DPU PR PR Kota Magelang yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DPU PR PR Kota Magelang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi DPU PR PR Kota Magelang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DPU PR PR Kota Magelang di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

Untuk menentukan isu-isu strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang prioritas untuk segera diselesaikan, diperlukan analisa Penentuan dan Prioritisasi Isu-isu Strategis, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
PENENTUAN DAN PRIORITISASI ISU - ISU STRATEGIS SKPD

No	Isu - Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	Kriteria Penilaian					Total Skor	Urutan Prioritas
		Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Kriteria 5		
1	Masih perlunya penambahan jaringan jalan/jembatan antar wilayah di Kota Magelang	3	3	2	2	3	13	III
2	Belum semua jalan di Kota magelang telah memiliki fasilitas bagi pejalan kaki dan penyandang cacat	3	2	3	3	3	14	II
3	Belum terselesaikan masalah kemacetan di ruas jalan tertentu	3	3	2	3	3	14	II
4	Belum dimilikinya Laboratorium Ke-PU-an untuk mengukur kualitas hasil pekerjaan pekerjaan kebinamargaan	3	1	3	3	3	13	III
5	Perlunya mempertahankan tingkat kenyamanan dan kualitas prasarana perkotaan melalui peningkatan maupun pemeliharaan	3	3	3	2	3	13	III

No	Isu - Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	Kriteria Penilaian					Total Skor	Urutan Prioritas
		Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Kriteria 5		
	secara berkala maupun rutin.							
6	Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertical terutama pada kawasan permukiman padat.	3	3	3	2	3	14	II
7	Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait dengan pelaksanaan kegiatan di bidang cipta karya dan perumahan	3	2	3	2	3	13	III
8	Semakin banyaknya perubahan fungsi saluran irigasi dikarenakan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian	3	3	1	2	3	13	III
9	Belum optimalnya kinerja jaringan drainase yang disebabkan karena adanya kerusakan yang disebabkan oleh umur konstruksi.	3	3	3	2	3	14	II
10	Semakin bertambahnya bangunan gedung bertingkat akan menyebabkan kerusakan lingkungan	2	3	3	1	3	12	IV

No	Isu - Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	Kriteria Penilaian					Total Skor	Urutan Prioritas
		Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Kriteria 5		
	hidup, jika tidak terkendali akan mengancam lingkungan khususnya sumber daya air bawah tanah							
11	Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal	2	1	3	3	3	12	IV
12	Kurangnya dukungan data dan informasi bagi penguatan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	2	2	3	2	3	12	IV
13	Keterbatasan staf yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa	3	1	3	3	3	13	III
16	Keterbatasan staf yang karena adanya moratorium dan pegawai yang purna tugas	3	1	3	2	3	12	IV
17	Belum optimalnya sistem pemanfaatan teknologi	3	1	3	2	2	11	V

No	Isu - Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	Kriteria Penilaian					Total Skor	Urutan Prioritas
		Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Kriteria 5		
	informasi serta lemahnya sistem data dan kearsipan							

Keterangan :

- **Kriteria 1** : Terkait langsung dengan/menyebabkan masalah pelayanan SKPD
Skor 1 jika kurang terkait, skor 2 jika cukup terkait, dan skor 3 jika sangat terkait langsung
- **Kriteria 2** : Menimbulkan dampak negatif yang signifikan atas kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
Skor 1 jika kurang menimbulkan dampak negatif, skor 2 jika cukup menimbulkan dampak negatif, dan skor 3 jika sangat menimbulkan dampak negatif
- **Kriteria 3** : Dapat diselesaikan melalui kompetensi, sumber daya dan program SKPD
Skor 1 jika kurang dapat diselesaikan, skor 2 jika cukup dapat diselesaikan, dan skor 3 jika sangat dapat diselesaikan
- **Kriteria 4** : Dapat diselesaikan dengan peningkatan kinerja SKPD, Skor 1 jika kurang dapat diselesaikan, skor 2 jika cukup dapat diselesaikan, dan skor 3 jika sangat dapat diselesaikan
- **Kriteria 5** : Keberhasilan penanganan akan membantu meningkatkan kontribusi SKPD pada pembangunan daerah secara keseluruhan,
Skor 1 jika kurang dapat meningkatkan kontribusi SKPD, skor 2 jika cukup dapat meningkatkan kontribusi SKPD, dan skor 3 dapat meningkatkan kontribusi SKPD

3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor .../PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian pekerjaan Umum tahun 2015 – 2019.

3.3.1.1. Kondisi Pekerjaan Umum

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempengaruhi kondisi Kota Magelang di antaranya adalah :

1. Pembangunan infrastruktur dipandang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan jika dilakukan secara sistemik.
2. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang akan terus meningkat yaitu mencapai 271 juta jiwa di tahun 2020, yang berimplikasi terhadap tuntutan pelayanan publik yang jauh lebih baik. Disamping itu pertumbuhan penduduk juga berpengaruh terhadap eksploitasi sumber daya alam yang cenderung tidak terkendali yang pada akhirnya dapat menurunkan daya dukung.
3. Arus urbanisasi yang tinggi diikuti dengan berbagai persoalan klasik perkotaan, seperti kemacetan, kekumuhan, banjir, degradasi kualitas lingkungan (udara dan air), minimnya ruang terbuka hijau, kurangnya air bersih, kesenjangan pendapatan, meningkatnya sektor informal, dan terjadinya perkembangan perkotaan horizontal
4. Perubahan iklim yang terjadi saat ini juga mengancam kehidupan, sebagai contoh perkotaan khususnya kota-kota di kawasan pesisir terancam rob akibat fenomena kenaikan muka air laut maupun terjadinya penurunan muka tanah seperti di Jakarta dan Semarang yang terutama disebabkan juga oleh pengambilan air tanah secara berlebihan
5. Secara geografis Indonesia terletak di kawasan "*ring of fire*" yang memiliki banyak gunung api yang aktif, terletak pada titik pertemuan empat lempeng tektonik dunia yang menyebabkan tingginya tingkat kejadian gempa bumi, hal ini berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, operasionalisasi serta pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
6. Kesenjangan wilayah Indonesia bagian timur dan bagian barat yang mengakibatkan wilayah di bagian timur Indonesia sangat kurang

pembangunan infrastrukturnya

7. Permasalahan utama di bidang maritim adalah kurang terpadunya perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan laut dan penyeberangan maupun pengembangan kota pesisir dengan pembangunan infrastruktur PUPR, terutama jalan dan sumber daya air
8. Pengendalian pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang, yang membawa implikasi kerusakan alam, sebagai contoh terjadinya sedimentasi pada badan-badan air, terjadinya longsor, dan daya tampung reservoir yang menurun secara signifikan
9. Sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercermin pada pola pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan masih perlu terus dilakukan perbaikan dan penataan yang intensif karena infrastruktur merupakan urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent* (dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah) sesuai dengan batasan kewenangan pusat dan daerah.

3.3.1.2. VISI Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang 2015 - 2019:

TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

3.3.1.3. MISI Kementerian Pekerjaan Umum

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

3.3.1.4. TUJUAN

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energy guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.

5. Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan berkepribadian

3.3.1.5. SASARAN

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
2. Meningkatnya ketahanan air.
3. Meningkatnya kehandalan jalan nasional
4. Meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses permukiman yang layak
5. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal
8. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkepribadian
9. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
10. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
11. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

3.3.2. Telaah Renstra pada Kementerian ESDM

3.3.2.1 Telaah Renstra pada Kementerian ESDM

Renstra Kementerian ESDM dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor .../PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM tahun 2015 – 2019.

3.3.2.2. Kondisi ESDM

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian ESDM di antaranya adalah :

1. Penurunan produksi minyak bumi sejak tahun 1995
2. Pemanfaatan energi domestik masih rendah
3. Akses energi terbatas
4. Ketergantungan impor BBM/LPG
5. Harga energi belum kompetitif dan subsidi energi tinggi
6. Bauran energi masih didominasi minyak bumi, sedangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) masih rendah
7. Pemanfaatan energi belum efisien

8. Nilai Tambah dan Pengawasan Pertambangan perlu ditingkatkan

3.3.2.3. VISI Kementerian ESDM

visi jangka panjang 2015 – 2019 :

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

3.3.2.4. MISI Kementerian ESDM

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

3.3.2.5. Tujuan

1. Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik
2. Terwujudnya Optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM
3. Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif
4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM
5. Terwujudnya manajemen & SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi

3.3.2.6. Sasaran

1. Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil
2. Meningkatkan alokasi energi domestik
3. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi
4. Meningkatkan diversifikasi energi
5. Meningkatkan efisiensi energi & pengurangan emisi
6. Meningkatkan produksi mineral & PNT

7. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM
8. Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran
9. Meningkatkan investasi sektor ESDM
10. Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional
11. Meningkatkan kapasitas iptek
12. Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi

3.3.3. Renstra pada Kementerian Dalam Negeri

3.3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Dalam Negeri

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan kondisi di Kota Magelang antaranya adalah :

1. Dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah yang Desentralistik, peningkatan pelayanan publik melalui SPM yang telah ditetapkan dan diinisiasi penerapannya, belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat
2. Belum meratanya pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, sehingga perlu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah/desa, mengembangkan pembangunan daerah dan desa berbasis maritim serta sumberdaya alam. Selain itu perlu pula dilakukan Pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah, Penanganan Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah, dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat

3.3.3.2. Visi

Visi Kementerian Dalam Negeri 2015 – 2019 :

Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

3.3.3.3 Misi

- a. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

- c. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
- d. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik

3.3.3.4 Tujuan

- a. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- d. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
- f. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri

3.3.3.5 Sasaran

- a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
- d. meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat Meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri; Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

3.3.4. Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah

3.3.4.1 Telaah Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah

Renstra Dinas Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

Visi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Terwujudnya jaringan jalan yang andal dan berkelanjutan untuk menuju Jawa Tengah Sejahtera

3.3.4.2. Misi

Misi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

1. Meningkatkan kinerja jalan dan jembatan untuk mencapai standarisasi jalan Provinsi sebagai jalan Kolektor Primer dan kolektor sekunder.
2. Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan
3. Memperkuat manajemen kelembagaan dan kualitas aparatur kelembagaan

3.3.4.3. TUJUAN

1. Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan jembatan agar selalu dalam kondisi Baik
2. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan;
3. Meningkatkan kualitas struktur jalan dan jembatan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung kebinamargaan;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas aparatur kebinamargaan.

3.3.4.4. Sasaran

1. Meningkatnya kinerja pelayanan jalan;
2. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan untuk melayani pertumbuhan lalu lintas;
3. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan sesuai dengan standarisasi jalan provinsi;
4. Meningkatnya sarana prasarana pendukung kebinamargaan sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan kinerja penanganan jalan;
5. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Bina Marga bsesuai tupoksi.

3.3.5. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

3.3.5.1. VISI

Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Penguatan Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Kemandirian Energi

3.3.5.2. MISI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

1. Meningkatkan Pengelolaan Pertambangan Dan Air Tanah Melalui Optimalisasi Pendayagunaan Dengan Mempertimbangkan Azas Konservasi;
2. Meningkatkan Pengelolaan Dan Pendayagunaan Ketenagalistrikan Dan Migas, Untuk Menjamin Ketersediaan Energi Melalui Peningkatan Infrastruktur Dan Diversifikasi Energi;
3. Mengembangkan Potensi Energi Baru Dan Terbarukan Melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Secara Mandiri;
4. Meningkatkan Upaya Pencegahan Resiko Bencana Alam Geologi Menuju Masyarakat Sadar Resiko Bencana Geologi;
5. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Yang Profesional Di Bidang ESDM.

3.3.5.3. Tujuan

1. optimalisasi pengelolaan pemanfaatan pertambangan dan air tanah
2. optimalisasi pengelolaan pemanfaatan ketenagalistrikan dan migas
3. mengoptimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sebagai energi alternatif
4. menurunkan resiko bencana alam geologi
5. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang ESDM

3.3.5.4. sasaran

1. Terwujudnya peningkatan produktivitas pemanfaatan pertambangan dan air tanah dan terkendalinya kerusakan lingkungan
2. Terwujudnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kg serta *captive power*
3. Peningkatan Rasio Elektrifikasi
4. Terwujudnya pembangunan infrastruktur pemanfaatan EBTKE setempat bagi masyarakat miskin dan terpencil
5. Meningkatkan pemanfaatan Energi baru Terbarukan dalam Bauran Energi (%).
6. Meningkatkan upaya pencegahan resiko bencana alam geologi
7. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang ESDM

3.3.6. Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah

3.3.6.1. Visi

Visi Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yaitu Mewujudkan Permukiman Yang Layak melalui Pembangunan Keciptakaryaan Sesuai Tata Ruang

3.3.6.2. Tujuan

- a. Menghilangkan kesenjangan kota - desa
- b. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum dan peningkatan prasarana dan sarana sanitasi, persampahan dan drainase
- c. Meningkatkan dan terkelolanya bangunan gedung serta berkembangnya jasa konstruksi
- d. Meningkatkan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta kualitas perumahan yang sehat
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan kumuh menuju lingkungan yang tertata, sehat dan asri
- f. Meningkatkan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana rinci penjabaran RTRWP sesuai peruntukan
- g. Meningkatkan keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruangnya
- h. Meningkatkan pembinaan penggunaan dan pemanfaatan kawasan lindung dan identifikasi perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan

3.3.6.3. Sasaran

- a. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan.
- b. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi.
- c. Meningkatkan dan Terkelolanya Bangunan Gedung serta Berkembangnya Jasa Konstruksi.
- d. Meningkatkan Perwujudan Perumahan Layak Huni serta Kualitas Perumahan yang Sehat.
- e. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman serta Kelembagaan di Bidang Perumahan.
- f. Meningkatkan Rencana Tata Ruang.
- g. Meningkatkan Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang.
- h. Meningkatkan Pembinaan dan Pengelolaan Lahan.

Tabel 3.1.
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPU PR PR Kota
 Magelang
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil
 Walikota Terpilih

Visi Kota Magelang : TERWUJUDNYA KOTA MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi ke 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat			
	Program – program pada DPU PR PR Kota Magelang			
I	Urusan Pekerjaan Umum			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belum sepenuhnya aparatur/SDM patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	Masih rendahnya aparatur/SDM yang ingin memahami peraturan perundang-undangan	Kemajuan bidang teknologi komunikasi dan informasi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belum optimalnya aset yang dikelola	Keterbatasan anggaran dan SDM	Kebutuhan akan kualitas sarpras yang

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	oleh dinas, diperlukan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang		memadai semakin tinggi seiring perkembangan ekonomi masyarakat
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi, sebagai bahan dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia, data dasar belum sepenuhnya tersedia dan kurang valid	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Monev
5	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Masih perlunya penambahan jaringan jalan antar wilayah di Kota Magelang.	Terkendala masalah kepemilikan aset karena bukan milik Pemerintah Kota Magelang.	Partisipasi masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur tinggi
6	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Masih perlunya peningkatan maupun penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat karena merupakan bagian dari lalu lintas	Lebar jalan yang tidak terlalu luas sehingga tidak semua ruas jalan dapat dibangun trotoar	Kebutuhan akan kualitas sarpras yang memadai semakin tinggi seiring perkembangan ekonomi masyarakat
7	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Usia bangunan yang sudah tua menyebabkan saluran drainase tidak cukup menampung limpasan air saat terjadi hujan yang deras.	Keterbatasan anggaran karena peningkatan saluran drainase dengan sistem pre cast u-ditch membutuhkan anggaran yang besar.	Tuntutan pengelolaan drainase yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengelolaan lingkungan
8	Program Rehabilitasi/Peningkatan Saluran			

	Drainase/Gorong-Gorong			
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Semakin banyaknya perubahan fungsi saluran irigasi dikarenakan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian	Sempadan irigasi banyak beralih fungsi lahan menjadi lahan terbangun.	Penataan ruang berbasis lingkungan hidup semakin digalakkan yang melindungi fungsi lindung kawasan sempadan sungai atau saluran irigasi dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan
10	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak	Masih kurangnya kesadaran masyarakat menggunakan air minum yang layak dikonsumsi	Partisipasi masyarakat dan swasta semakin tinggi untuk turut serta mengatasi permasalahan lingkungan
		Belum optimalnya pemerintah daerah dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar	Keterbatasan SDM	Partisipasi masyarakat dan swasta semakin tinggi untuk turut serta mengatasi permasalahan lingkungan
11	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan, dikarenakan	Keterbatasan anggaran daerah	Program pro rakyat semakin banyak dilaksanakan, dan semakin banyak masyarakat yang mengawasi berjalannya

		keterbatasan anggaran Daerah		program tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program
12	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah	Keterbatasan anggaran daerah	Program pro rakyat semakin banyak dilaksanakan, dan semakin banyak masyarakat yang mengawasi berjalannya program tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program
I	Urusan Perumahan			
1	Program Pengembangan Perumahan	Terbatasnya lahan di perkotaan, menuntut pengembangan perumahan secara vertikal.	Hunian vertikal belum membudaya di Kota Magelang	Kebijakan pemerintah semakin mendorong berdirinya perumahan vertikal yang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah
		Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi	Keterbatasan lahan dan anggaran untuk pengembangan perumahan baru yang bisa diakses oleh masyarakat menengah ke bawah dan dekat dengan sumber	Kebijakan pemerintah semakin mendorong berdirinya perumahan vertikal yang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah

		penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	penghidupan mereka	
3	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Belum optimalnya pembangunan prasarana sanitasi	Terkendala aturan saat pelaksanaan di lapangan	Adanya dukungan dana dari pusat dan daerah
4	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam memberdayakan masyarakat untuk berperilaku bersih dan sehat pada lingkungan perumahan.	Masih belum tertibnya masyarakat berperilaku bersih dan sehat pada lingkungannya	Adanya kemauan masyarakat untuk bergotong royong untuk membersihkan lingkungannya agar lingkungan bisa bersih dan sehat
5	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Belum optimalnya kapasitas aparatur	Masih sedikit aparatur yang bersertifikat	Adanya aturan yang mendukung

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Struktur Tata Ruang

1. Rencana Struktur Ruang Daerah terdiri atas:

- e. Penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dan mampu meningkatkan peran dan fungsi daerah menjadi Pusat Kegiatan Wilayah di Purwomanggung;
 - 1). Meningkatkan keterkaitan antara Daerah sebagai PKW dengan kawasan Purwomanggung sebagai Pusat Kegiatan Lokal
 - 2). Menata, mengembangkan dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan perekonomian daerah yang mempunyai skala pelayanan regional yang terdiri dari kawasan armada estate, kawasan kebonpolo, kawasan alun-alun, kawasan jalan pemuda, kawasan sentra perekonomian lembah tidar, kawasan taman kyai langgeng, kawasan Soekarno Hatta, dan Kawasan Pasar tradisional Rejowinangun.
 - 3). Menata, mengembangkan, mengkoordinasi, membangun kawasan pusat kegiatan pendidikan Daerah yang mempunyai skala pelayanan regional dan/atau nasional yang terdiri dari kawasan pendidikan sidotopo, kawasan akademi keperawatan dan akademi kebidanan politeknik kesehatan, kawasan akademi teknik tirta wiyata, kawasan Gedung Olahraga (GOR) Samapta, kawasan universitas tidar Magelang, kawasan SECABA, kawasan UMM, serta kawasan pendidikan tingkat atas, menengah, dan dasar yang ditetapkan Pemerintah Daerah bertaraf nasional dan internasional dan
 - 4). Menata, mengembangkan, mengkoordinasi dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan kesehatan daerah yang terdiri dari kawasan kompleks RSJ, kawasan RSI, Kawasan Rumah sakit bersalin Budi Rahayu, Kawasan Rumah sakit tentara dr Soedjono, Kawasan Rumah Sakit Lestari Raharja, Kawasan Rumah Sakit Amanda, kawasan rumah sakit bersalin gladiol, kawasan rumah sakit umum daerah Tidar, kawasan rumah sakit harapan, kawasan Rumah Bersalin Panti Bahagia, dan kawasan Balai Pengobatan paru-paru.
- f. Pengembangan dan peningkatan akses, serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Daerah yang merata dan berhierarki guna meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah
 - 1). Menjaga dan meningkatkan akses keterkaitan fungsi kawasan perkotaan antara pusat kegiatan utama kawasan perkotaan dengan kawasan pusat-pusat kegiatan utama kawasan perkotaan lainnya, yaitu antara kawasan pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata

- daerah dengan pusat-pusat kegiatan lainnya yang terdiri dari pusat kegiatan permukiman, pusat kegiatan pemerintahan dan lainnya.
- 2). Mengembangkan dan menata pusat pertumbuhan kegiatan baru secara berhierarki.
 - 3). Mendorong kawasan kegiatan utama kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan kegiatan baru agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitarnya; dan
 - 4). Meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan yang potensial menjadi pusat pelayanan tingkat kota.
- g. Pengembangan sistem sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan sistem regional, provinsi, dan nasional
- 1). Memadukan, meningkatkan dan/atau membangun jaringan infrastruktur transportasi darat yang terdiri dari jaringan jalan beserta pendukungnya, sarana terminal penumpang dan barang, dan lokasi pergantian moda transportasi barang dan orang secara terintegrasi dengan jaringan pelayanan transportasi regional, provinsi dan nasional;
 - 2). Memadukan, menata, dan/atau membangun jaringan pengolahan sampah daerah dengan kawasan Kabupaten Magelang secara terintegrasi melalui pemrosesan akhir sampah regional;
 - 3). Memadukan, mengembangkan dan menjaga kualitas jaringan irigasi kali progo manggis sebagai bagian infrastruktur pengairan Pemerintah dan Kali Bening sebagai bagian infrastruktur pengairan Provinsi untuk menunjang pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- h. Pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah meliputi :
- 1). Meningkatkan kualitas dan kuantitas, menata, dan/atau membangun sistem prasarana transportasi darat di daerah untuk kelancaran distribusi barang/jasa dengan mengembangkan terminal tipe A, terminal tipe C, jaringan jalan kota, sarana angkutan umum, prasarana pejalan kaki dan prasarana pendukung jaringan jalan;
 - 2). Mengembangkan, menata, dan mengintegrasikan sistem prasarana dan jaringan pengairan irigasi daerah agar terpadu dengan jaringan irigasi regional untuk menunjang kegiatan sektor pertanian berkelanjutan;
 - 3). Mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun kualitas sistem jaringan air bersih daerah meliputi sumber mata air, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi air bersih, serta sarana pendukungnya;
 - 4) Menata, memantau, melindungi, dan mengkonservasi air tanah sebagai

- salah satu sumber daya air bersih daerah dengan prinsip berkelanjutan;
- 5). Mengembangkan, menata, dan mewujudkan keterpaduan sistem prasarana ketenagalistrikan yang meliputi jaringan transmisi, gardu induk distribusi, dan jaringan distribusi energi kelistrikan, serta energi alternatif
 - 6). Mengembangkan, mengembangkan, menata, meningkatkan kualitas sistem pengelolaan sampah Daerah dengan metode penggunaan kembali sampah, reduksi sampah, dan daur ulang sampah, serta membangun dan mewujudkan keterpaduan sistem pengelolaan persampahan Daerah dengan wilayah Kabupaten Magelang
 - 7). Mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun secara bertahap jaringan dan sarana pengolahan air limbah sehingga terpisah dengan jaringan drainase untuk kesehatan dan keberlanjutan lingkungan Daerah;
 - 8). Mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun jaringan drainase secara bertahap dan berhierarki sehingga tercapai keterpaduan sistem drainase untuk menghindari genangan air dan/atau banjir akibat hujan di wilayah Daerah; dan
 - 9). mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan dan kawasan permukiman untuk mewujudkan keterpaduan dengan sistem penyediaan jaringan pelayanan air bersih, persampahan, air limbah, dan drainase tingkat kota agar lebih berkualitas.

3.4.2. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Magelang

Rencana Pola Ruang Daerah terdiri atas:

1. Kawasan Lindung

- a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - 1). Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi yang meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, RTH, kawasan suaka alam, kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam
 - 2). Mewujudkan RTH untuk mencapai luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah
 - 3). Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam

rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;

- 4). Mengembangkan, menata, mempertahankan, dan/atau meningkatkan kualitas kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata Daerah; dan
 - 5). Mengarahkan kawasan rawan bencana tanah longsor sebagai kawasan sabuk hijau (*green belt*).
- b. Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
- 1). Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
 - 2). Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - 3). Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
 - 4). Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - 5). Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
 - 6). Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana

2. Kawasan Budidaya

- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- 1). menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kota untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah
 - 2). Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk

mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;

- 3). mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, dan ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 4). mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Daerah dan/atau Provinsi, serta nasional; dan
 - 5). mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman, pariwisata, pertanian, dan industri, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.
- b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup
- 1). Mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budidaya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup
 - 2). Mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan rawan bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana
 - 3). mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana
 - 4). Membatasi alih fungsi lahan pertanian sawah produktif melalui penataan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan dan mengembangkan kawasan tanah non produktif untuk kegiatan non pertanian;
 - 5). Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak negatif yang mungkin timbul termasuk bencana; dan
 - 6). Menyiapkan jalur evakuasi bencana dan menyediakan ruang evakuasi bencana.

3. Kawasan Strategis Wilayah Daerah

4. Menetapkan kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berpengaruh pada fungsi lindung
5. Mengkoordinasikan penataan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus kawasan pertahanan negara meliputi Kawasan Akademi

Militer (AKMIL), Kawasan Sekolah Calon Bintara (SECABA), Kawasan Komando Distrik Militer (KODIM) dan Resimen Induk Daerah Militer (RINDAM) IV Diponegoro, dan Kawasan Batalyon, Artileri Medan (Yon ARMED) 11.

6. Menetapkan kawasan strategis Daerah dengan fungsi pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari Kawasan Alun-alun, Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar, Kawasan Sidotopo, Kawasan Gedung Olahraga (GOR) Samapta, Kawasan Sukarno-Hatta, dan Kawasan Kebonpolo;

3.4.3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Magelang

1. Rencana sistem perkotaan

a. Pusat pelayanan kota terdiri dari :

Bagian Wilayah Kota (BWK) I merupakan pusat kota dengan fungsi dan arah pengembangan utama sebagai kawasan yang mewadahi kegiatan perkotaan, dengan karakteristik kegiatan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala kota, rekreasi wisata perkotaan yang terdapat di sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, dan sebagian Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, yaitu Kawasan Alun-alun

b. Subpusat pelayanan kota terdiri dari :

- 1). subpusat pelayanan kota terdapat di pusat BWK II yang merupakan wilayah konsentrasi kegiatan permukiman, pendidikan tinggi dan militer meliputi Kelurahan Wates dan Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, yaitu Kawasan Kebonpolo
- 2). Subpusat pelayanan kota terdapat di pusat BWK III dengan pengembangan dan pemanfaatan ruang sebagai kawasan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian alam, pendidikan militer meliputi Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah dan Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, yaitu Kawasan Kyai Lenggeng
- 3). Subpusat pelayanan kota terdapat di pusat BWK IV sebagai kawasan pusat pemerintahan, industri kecil dan menengah, simpul pergerakan barang dan jasa orang, meliputi Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, yaitu Kawasan Sukarno – Hatta
- 4). Subpusat pelayanan kota terdapat di pusat BWK V dengan fungsi dan arah pengembangan sebagai kawasan olahraga dan rekreasi skala

kota, pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, yaitu Kawasan Sidotopo

c. Pusat lingkungan

Mempunyai cakupan pelayanan skala lingkungan wilayah daerah yang dikembangkan pada masing-masing BWK

2. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Daerah

a. Rencana sistem prasarana utama

1). Rencana sistem jaringan prasarana transportasi darat

a). Rencana sistem jaringan pelayanan kereta api yang merupakan jaringan kereta api regional Semarang – Magelang - Yogyakarta

b). Rencana sistem jaringan jalan

- Pengembangan jaringan jalan berdasarkan sistem
 - jalan arteri primer dan sekunder; meliputi :
 - Ruas jalan arteri primer antara Semarang (PKN) – Magelang (PKW) – Yogyakarta (PKN) : Jl Jendral A Yani – Jl Urip Sumoharjo – Jl Soekarno Hatta;
 - Penurunan sistem arteri primer yaitu Jl jend A Yani – Jl Pemuda – Jl Jend Sudirman.
 - Pengembangan ruas jalan lingkaran timur sebagai arteri primer yang melewati rute di wilayah Kabupaten Magelang dan terintegrasi dengan jaringan regional, provinsi dan Nasional
 - jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
 - jalan lokal primer dan lokal sekunder; dan
 - jalan lingkungan sekunder
- pengembangan lokasi dan kelas pelayanan terminal
 - Terminal Tipe A yaitu Terminal Tidar di Kelurahan Tidar Utara (BWK IV);
 - Terminal Tipe C yaitu Terminal Kawasan Kebonpolo (BWK II), Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo (BWKI), Terminal Kawasan Canguk (IV), Terminal Kawasan Sambung (BWK V), Terminal Kawasan Shopping Center (BWK I), Terminal Kawasan Jalan Jenderal Sudirman (BWK IV), dan Terminal Kawasan Jalan Kalimas (BWK V); dan

➤ Terminal Angkutan Barang berada di Jalan Sukarno-Hatta Kelurahan Tidar Utara (BWK IV)

- pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum;
- pengembangan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA)

b. Rencana sistem prasarana lainnya

- 1). rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- 2). rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air;
- 3). rencana sistem jaringan prasarana energi; dan
- 4). rencana infrastruktur perkotaan.

Sedangkan, mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan juga dokumen RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031, potensi pengembangan wilayah Kota Magelang pada masa mendatang adalah :

1. Kawasan Sidotopo sebagai pusat pelayanan pendidikan dan perdagangan jasa
2. Kawasan Soekarno Hatta sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan
3. Kawasan Alun-alun sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran
4. Kawasan Kebonpolo
5. Kawasan GOR Samapta sebagai pusat pelayanan rekreasi dan olahraga
6. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan
7. Kawasan Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagai kawasan pusat pelayanan rekreasi dan olahraga.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang tetap mengacu pada penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar Wilayah Daerah, serta keserasian antar sektor. Sesuai dengan rencana kebijakan RTRW Kota Magelang, pengembangan struktur ruang Daerah meliputi pengembangan jaringan jalan, pengembangan jaringan irigasi, pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, pengembangan prasarana air minum, pengembangan prasarana air limbah, pengembangan prasarana drainase, pengembangan kawasan peruntukan perumahan dan permukiman,

pengembangan jalur pejalan kaki, pengembangan pariwisata, pengembangan perdagangan jasa, dan pengembangan kawasan olahraga.

3.4.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang serta pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor pendorong dan penghambat terhadap pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sebagaimana terdapat pada.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait tugas dan fungsi DPU PR PR Kota Magelang	Permasalahan Pelayanan DPU PR PR Kota Magelang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat (Pasal 109)	Belum sepenuhnya aparatur/SDM patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	Masih rendahnya aparatur/SDM yang ingin memahami peraturan perundang-undangan	Kemajuan bidang teknologi komunikasi dan informasi
		Belum optimalnya aset yang dikelola oleh dinas, diperlukan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang	Keterbatasan anggaran dan SDM	Kebutuhan akan kualitas sarpras yang memadai semakin tinggi seiring perkembangan ekonomi masyarakat
		Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi, sebagai bahan dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia, data dasar belum sepenuhnya tersedia dan kurang valid	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Monev

Rencana pengembangan jaringan jalan (Pasal 9, 10, 23)	Masih perlunya penambahan jaringan jalan antar wilayah di Kota Magelang.	Terkendala masalah kepemilikan aset karena bukan milik Pemerintah Kota Magelang.	Partisipasi masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur tinggi
Pengembangan jalur pejalan kaki (Pasal 42)	Masih perlunya peningkatan maupun penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat karena merupakan bagian dari lalu lintas	Lebar jalan yang tidak terlalu luas sehingga tidak semua ruas jalan dapat dibangun trotoar	Kebutuhan akan kualitas sarpras yang memadai semakin tinggi seiring perkembangan ekonomi masyarakat
Pengembangan drainase (Pasal 40)	Usia bangunan yang sudah tua menyebabkan saluran drainase tidak cukup menampung limpasan air saat terjadi hujan yang deras.	Keterbatasan anggaran karena peningkatan saluran drainase dengan sistem pre cast u-ditch membutuhkan anggaran yang besar.	Tuntutan pengelolaan drainase yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengelolaan lingkungan
Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan (pasal 37)	Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah	Keterbatasan anggaran daerah	Program pro rakyat semakin banyak dilaksanakan, dan semakin banyak masyarakat yang mengawasi berjalannya program

				tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program
	Pengembangan prasarana air minum (Pasal 38)	Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak	Masih kurangnya kesadaran masyarakat menggunakan air minum yang layak dikonsumsi	Partisipasi masyarakat dan swasta semakin tinggi untuk turut serta mengatasi permasalahan lingkungan
	Pengembangan prasarana air limbah (Pasal 40)	Belum optimalnya pemerintah daerah dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar	Keterbatasan SDM	Partisipasi masyarakat dan swasta semakin tinggi untuk turut serta mengatasi permasalahan lingkungan
	Kawasan peruntukan perumahan (Pasal 55)	Terbatasnya lahan di perkotaan, menuntut pengembangan perumahan secara vertikal.	Hunian vertikal belum membudaya di Kota Magelang	Kebijakan pemerintah semakin mendorong berdirinya perumahan vertikal yang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah
	Kawasan peruntukan perumahan (Pasal 55)	Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan	Keterbatasan lahan dan anggaran untuk pengembangan perumahan baru yang bisa diakses oleh masyarakat menengah ke	Kebijakan pemerintah semakin mendorong berdirinya perumahan vertikal yang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah

		perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	bawah dan dekat dengan sumber penghidupan mereka	
	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air (Pasal 31)	Semakin banyaknya perubahan fungsi saluran irigasi dikarenakan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian	Sempadan irigasi banyak beralih fungsi lahan menjadi lahan terbangun.	Penataan ruang berbasis lingkungan hidup semakin digalakkan yang melindungi fungsi lindung kawasan khususnya sempadan sungai atau saluran irigasi dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan

3.4.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan DPU PR-PR Kota Magelang yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

6.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DPU PR-PR Kota Magelang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi DPU PR Kota Magelang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DPU PR-PR Kota Magelang di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

6.5.1. Isu Strategis Bidang Bina Marga dan Pengairan

1. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota
2. Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Kota Magelang dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah.
3. Belum terselesaikan masalah kemacetan di beberapa ruas jalan seperti di Jalan Urip Sumoharjo, Jl Soekarno Hatta dan Jalan pemuda.
4. Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jalan untuk mempertahankan tingkat kenyamanan dan keamanan prasarana jalan.
5. Meningkatkan aksesibilitas pedestrian khususnya bagi penyandang difabilitas.

6. Adanya perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global
7. Peningkatan kualitas dan pola pemeliharaan sistem drainase kota.
8. Belum optimalnya kinerja jaringan irigasi yang disebabkan karena adanya kerusakan yang disebabkan oleh umur konstruksi, bencana alam (longsor) dan masih rendahnya keterlibatan petani dan stake holders lainnya untuk memelihara jaringan irigasi.
9. Semakin bertambahnya bangunan gedung bertingkat akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, jika tidak terkendali akan mengancam lingkungan khususnya sumber daya air bawah tanah.

6.5.2. Isu Strategis Bidang Cipta Karya

1. Bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan setiap tahun
2. Masih terdapatnya kemiskinan yang cukup tinggi di perkotaan
3. Luas lahan perkotaan yang terbatas tidak mampu menampung desakan pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap memunculkan permukiman yang tidak teratur, kumuh, dan tidak layak huni.
4. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan karena harga di perkotaan.
5. Keterbatasan penyediaan rumah yang terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

6.5.3. Isu strategis Bidang Penataan Ruang

1. Panjangnya proses penetapan Perda RTRW sampai sekarang belum ditetapkan menyebabkan beberapa pelaksanaan kegiatan fisik strategis mengalami penundaan.
2. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang harus diakomodir dalam dokumen tata ruang, seperti reaktivasi jalur KA, pembangunan pintu tol dan pemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
3. Harmonisasi rencana pola ruang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai lampiran persetujuan substansi belum menemui titik temu.
4. Semakin bertambahnya bangunan gedung bertingkat akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, jika tidak terkendali akan mengancam lingkungan khususnya sumber daya air bawah tanah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Telaah Visi dan Misi

Visi menurut Wibisono (2006: 43), visi adalah serangkaian kata-kata bahkan rangkaian kalimat mengungkapkan impian, cita-cita, rencana, harapan sebuah perkumpulan, perusahaan, organisasi yang ingin dicapai di masa mendatang. Visi juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk organisasi demi menjamin kesuksesan dan kelestarian organisasi/perusahaan jangka panjang. Dengan kata lain dapat diekspresikan visi merupakan *'want to be'* dari perkumpulan, perusahaan ataupun organisasi.

Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai pembangunan, kegiatan pembangunan pada umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai Visi RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 adalah **TERWUJUDNYA KOTA MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS**".

Komponen visi diterjemahkan sebagai berikut:

1. Kota jasa:

Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan dan sektor pendidikan.

2. Kota Modern:

Modern berarti suatu kondisi lebih maju drpd daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada.

3. Kota Cerdas:

Kota cerdas terwujud dalam kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis tehnologi informasi, dan dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Kota cerdas memuat unsur-unsur:

- 1) *Smart Governance* yaitu: Pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- (2) *Smart infrastructure* yaitu Pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT
- (3) *Smart Economy*, yaitu: Pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, Pengembangan *e-commerce*
- (4) *Smart environment* yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pengembangan sumber energi terbarukan
- (5) *Smart people* yaitu: Pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat
- (6) *Smart Living* yaitu: Kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, kemudahan akses terhadap jaminan keamanan

4. Masyarakat Sejahtera:

Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat melalui (1) optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

5. Kota Religius

Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada Ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah. Masyarakat religius yang akan dicapai tahun 2016-2021 sebagai penyiapan landasan terbentuknya masyarakat madani di tahun 2025 sebagaimana digariskan dalam RPJPD Kota Magelang tahun 2005-2025, yang ditandai dengan:

1. Kebiasaan dialog timbal balik warga dengan pemerintah di ruang publik yang luas
2. Kehidupan demokratis bagi warga
3. Toleransi atau saling menghargai dalam kehidupan masyarakat

4. Sikap masyarakat yang tulus menerima perbedaan yang ada di masyarakat (pluralisme)
5. Keadilan sosial bagi warga

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, Infrastruktur merupakan modal dasar bagi penyelenggaraan layanan kebutuhan ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan budaya. Infrastruktur yang baik menjadi daya tarik pengunjung ke Magelang, sehingga Magelang menjadi daerah yang nyaman untuk berusaha, berinvestasi, disingahi, mencari rejeki, rekreasi, maupun ditinggali.

Menurut Wheelen (dikutip oleh Wibisono, 2006: 46-47), menyatakan misi adalah untaian kalimat yang berisi tujuan dan alasan keberadaan suatu organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan/ organisasi kepada masyarakat, berupa produk dan jasa. Misi dapat digunakan sebagai petunjuk arah dalam dunia bisnis sekarang. Adapun tujuan dari pengikraran misi adalah menyampaikan kepada stakeholder, dalam organisasi maupun luar, berisi tentang latar belakang berdirinya perusahaan, arah dan tujuan perusahaan. Penggunaan satu bahasa dan komitmen yang mudah dipahami dan dirasakan kegunaannya oleh semua pihak yang terkait seharusnya merupakan pernyataan misi yang bagus dan efektif.

Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi, dengan kata lain misi memberikan keterangan tentang bagaimana lembaga bekerja mencapai visi yang dicita - citakan. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Misi Kota sebagai berikut

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani

Berdasarkan visi misi kota, posisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang mendukung pada perwujudan unsur visi Masyarakat Sejahtera melalui misi Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

4.2. Tujuan dan Sasaran

Berpijak pada keterkaitan tersebut, tujuan dan sasaran renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun sebagai berikut.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Tahun 2016 -2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1 (2017)	2	3	4	5 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	m	942 m	1342 m	1742 m	2242 m	2242 m
			Prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	%	91,89%	93%	94%	95%	96%
			Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	90%	91,5%	92%	93,5%	95%
			Prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik	%	64,39%	66,34%	66,65%	68,59%	71,89%
			prosentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	85%	86%	87%	88%	89%
			jumlah shipon yang dibangun	bh	6	7	8	9	10
			Persentase saluran irigasi	%	79%	81%	84%	86%	87%

			dalam kondisi baik						
			persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota (SPM)	%	98,41%	98,90%	99,46%	99,46%	100%
			persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang (SPM)	%	90%	91,5%	92%	93,5%	95%
			persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (SPM)	%	85%	85%	86%	86%	87%
			Persentase prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik	%	10%	20%	40%	60%	80%
			Persentase kawasan strategis yang terbangun	%	75%	84%	90%	96%	100%
3	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	Meningkatnya tertib administrasi penyedia jasa konstruksi	Tersedianya up date badan usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik	%	70%	72%	74%	76%	78%

			baru maupun perpanjangan						
5	Mewujudkan aparatur pegawai yang disiplin, profesional dan berintegritas	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Tertib administrasi perkantoran dan kepegawaian	%	100	100	100	100	100
		Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	Rasio pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	100	100	100	100	100
			Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan	%	78,57%	78,57%	92,85%	92,85%	92,85%
		Terwujudnya pengelolaan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Tertib administrasi keuangan dan waktu pengiriman laporan keuangan	bulan	12	12	12	12	12
		Terwujudnya pengendalian operasional kegiatan dan keuangan perangkat daerah	Tertib pengendalian kegiatan dan pelaporan kinerja	%	100	100	100	100	100
Mewujudkan Kota Magelang yang tertata dan terkendali penataan ruangnya	Terwujudnya bangunan gedung/reklame yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan tata bangunan	Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan	%	24	25	25	25	25	
			Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber-IMB	%	0,748	1,131	1,521	1,918	2,495

4.3. Strategi dan Kebijakan

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang melalui Rencana Strategis Tahun 2016-2021, maka menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam regulasi daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan

Pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang mendukung misi 3

VISI Daerah : MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS			
MISI III : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas	1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	1. Peningkatan infrastruktur jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata 2. Peningkatan kualitas drainase yang bebas banjir	1. Pembangunan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan Monitoring dan pemeliharaan kondisi jalan dan trotoar 2. Penyediaan Pedestrian atau trotoar untuk semua jalan kolektor 3. Penyediaan penerangan jalan umum di seluruh jalan 4. Meningkatkan kualitas dan dimensi bangunan drainase Primer dan sekunder

<p>Mewujudkan Kota Magelang yang tertata dan terkendali penataan ruangnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya bangunan gedung/reklame yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan tata bangunan 2. Tersedianya up date bangunan ber-IMB di Kota Magelang 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengawasan terhadap pembangunan bangunan/reklame yang didirikan dengan melibatkan aparat dari pemangku wilayah (Kelurahan). 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan gedung/reklame yang sudah ber-IMB. 5. Percepatan dalam pemberian Rekomendasi Teknis IMB 6. Melakukan Input data arsip IMB ke dalam Excel 7. Melaksanakan evaluasi terhadap ketentuan Garis Sempadan dan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Reklame. 8. Inventarisasi/pendataan bangunan gedung termasuk perumahan. 9. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan 10. Penyebaran informasi tata ruang dan tata bangunan kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan teknologi informasi (Website, Facebook, WhatsApp, BBM) untuk mempercepat informasi/laporan terkait aktivitas pembangunan/renovasi. 2. Menambah sumber daya manusia di bidang Tata Kota yang mempunyai kompetensi dibidang perencanaan kota, arsitektural, dan konstruksi/sipil 3. Menambah sarana dan prasarana pendukung untuk survei ke lapangan (hammer test, teodolit, pakaian lapangan, kendaraan operasional, dll) 4. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait (Bappeda, BP2T, DPU PR, Dishubkominfo, Satpol PP, dll) 5. Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Pemberlakuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 6. Menyediakan sarana-dan prasarana pendukung pengelolaan kearsipan (Scanner, lemari arsip, dus arsip, ruang arsip yang lebih memadai) 7. Menyediakan personil yang bertugas 8. Pelaksanaan sosialisasi tentang pemanfaatan & pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat secara berkala.
---	--	--	---

			9. Penyebaran media informasi tata ruang dan tata bangunan yang berupa leaflet, spanduk, banner di tiap Kelurahan, Kecamatan, dan tempat- tempat umum yang strategis
Menyediakan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan tugas	Tersedianya regulasi di bidang bangunan gedung	Menyusun draft Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame, draft Peraturan Walikota tentang Reklame, dan draft Peraturan Walikota tentang Garis Sempadan Bangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi lintas SKPD 2. Studi banding ke daerah lain 3. Alokasi Anggaran
Mewujudkan aparatur pegawai yang disiplin, profesional dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai aturan yang berlaku 2. Terpenuhinya sarana prasarana kantor yang memadai baik jumlah maupun kualitas 3. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan smart city dalam tata pemerintahan dan pelayanan publik 4. Terwujudnya aparatur yang disiplin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM yang kompeten di bidangnya 2. Sensus sarana prasarana kantor 3. Pengelolaan website dan media komunikasi lainnya 4. Identifikasi petugas lapangan saat bertugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan dalam pelatihan/diklat 2. Pengadaan sarana dan prasarana kantor 3. Menjalin kerja sama dengan pengelola media online dan cetak 4. Pengadaan perlengkapan kerja petugas lapangan

Tabel 4.3
Strategi dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Tahun 2016 -2021

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan
1	Mewujudkan aparatur pegawai yang disiplin, profesional dan berintegritas	1	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian	1	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia	1	Pengiriman personil untuk mengikuti diklat/bintek
		2	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	1	Penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	1	Penyediaan sarpras sesuai peraturan perundang-undangan
		3	Terwujudnya pengelolaan keuangan skpd yang akuntabel	1	Menyusun SOP tentang pengelolaan keuangan SKPD	1	Penunjukan pengelola keuangan yang kompeten
		4	Terwujudnya pengendalian operasional kegiatan dan keuangan skpd	1	Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi	1	Mengoptimalkan koordinasi dengan bidang, UPTD dan Sub Bagian
2	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	1	Meningkatnya tertib administrasi penyedia jasa konstruksi	1	Pelayanan satu atap dan Penyederhanaan waktu perijinan menjadi lebih singkat	1	Mengoptimalkan sarana prasarana instansi serta koordinasi yang baik antar instansi
2	Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik	1	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	1	Peningkatan infrastruktur jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata	1	Pembangunan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan

						2	Penyediaan Pedestrian atau trotoar untuk semua jalan kolektor
						3	Monitoring dan pemeliharaan kondisi jalan dan trotoar
						2	Peningkatan kualitas drainase yang bebas banjir
						1	Meningkatkan kualitas dan dimensi bangunan drainase Primer dan sekunder
	Mewujudkan Kota Magelang yang tertata dan terkendali penataannya	1	Terwujudnya bangunan gedung/reklame yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan tata bangunan		Pengawasan terhadap pembangunan bangunan/reklame yang didirikan dengan melibatkan aparat dari pemangku wilayah (Kelurahan).		Memanfaatkan teknologi informasi (Website, Facebook, WhatsApp, BBM) untuk mempercepat informasi/laporan terkait aktivitas pembangunan/renovasi
			Tersedianya up date bangunan ber-IMB di Kota Magelang		Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan gedung/reklame yang sudah ber-IMB.		
					Percepatan dalam pemberian Rekomendasi Teknis IMB		
					4. Melakukan Input data arsip IMB ke dalam Excel		

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang melalui Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, maka menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam regulasi daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan

Pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel V.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang mendukung misi 3

VISI Daerah : MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS			
MISI III : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas	1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	1. Peningkatan infrastruktur jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata 2. Peningkatan kualitas drainase yang bebas banjir	1. Pembangunan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan Monitoring dan pemeliharaan kondisi jalan dan trotoar 2. Penyediaan Pedestrian atau trotoar untuk semua jalan kolektor 3. Penyediaan penerangan jalan umum di seluruh jalan 4. Meningkatkan

			kualitas dan dimensi bangunan drainase Primer dan sekunder
Mewujudkan Kota Magelang yang tertata dan terkendali penataan ruangnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya bangunan gedung/reklame yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan tata bangunan 2. Tersedianya up date bangunan ber-IMB di Kota Magelang 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengawasan terhadap pembangunan bangunan/reklame yang didirikan dengan melibatkan aparat dari pemangku wilayah (Kelurahan). 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan gedung/reklame yang sudah ber-IMB. 5. Percepatan dalam pemberian Rekomendasi Teknis IMB 6. Melakukan Input data arsip IMB ke dalam Excel 7. Melaksanakan evaluasi terhadap ketentuan Garis Sempadan dan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Reklame. 8. Inventarisasi/pendataan bangunan gedung termasuk perumahan. 9. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan 10. Penyebaran informasi tata ruang dan tata bangunan kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan teknologi informasi (Website, Facebook, WhatsApp, BBM) untuk mempercepat informasi/laporan terkait aktivitas pembangunan/renovasi. 2. Menambah sumber daya manusia di bidang Tata Kota yang mempunyai kompetensi dibidang perencanaan kota, arsitektural, dan konstruksi/sipil 3. Menambah sarana dan prasarana pendukung untuk survei ke lapangan (hammer test, teodolit, pakaian lapangan, kendaraan operasional, dll) 4. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait (Bappeda, BP2T, DPU PR, Dishubkominfo, Satpol PP, dll) 5. Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Pemberlakuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 6. Menyediakan sarana-dan prasarana pendukung pengelolaan kearsipan (Scanner, lemari arsip, dus arsip, ruang arsip yang lebih memadai) 7. Menyediakan personil yang bertugas 8. Pelaksanaan sosialisasi tentang

			<p>pemanfaatan & pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat secara berkala.</p> <p>9. Penyebaran media informasi tata ruang dan tata bangunan yang berupa leaflet, spanduk, banner di tiap Kelurahan, Kecamatan, dan tempat- tempat umum yang strategis</p>
Menyediakan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan tugas	Tersedianya regulasi di bidang bangunan gedung	Menyusun draft Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame, draft Peraturan Walikota tentang Reklame, dan draft Peraturan Walikota tentang Garis Sempadan Bangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi lintas SKPD 2. Studi banding ke daerah lain 3. Alokasi Anggaran
Mewujudkan aparatur pegawai yang disiplin, profesional dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai aturan yang berlaku 2. Terpenuhinya sarana prasarana kantor yang memadai baik jumlah maupun kualitas 3. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan smart city dalam tata pemerintahan dan pelayanan publik 4. Terwujudnya aparatur yang disiplin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM yang kompeten di bidangnya 2. Sensus sarana prasarana kantor 3. Pengelolaan website dan media komunikasi lainnya 4. Identifikasi petugas lapangan saat bertugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti sertakan dalam pelatihan/diklat 2. Pengadaan sarana dan prasarana kantor 3. Menjalin kerja sama dengan pengelola media online dan cetak 4. Pengadaan perlengkapan kerja petugas lapangan

Tabel V.2
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Tahun 2016 -2021

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan
1	Mewujudkan aparatur pegawai yang disiplin, profesional dan berintegritas	1	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian	1	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia	1	Pengiriman personil untuk mengikuti diklat/bintek
		2	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	1	Penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	1	Penyediaan sarpras sesuai peraturan perundang-undangan
		3	Terwujudnya pengelolaan keuangan skpd yang akuntabel	1	Menyusun SOP tentang pengelolaan keuangan SKPD	1	Penunjukan pengelola keuangan yang kompeten
		4	Terwujudnya pengendalian operasional kegiatan dan keuangan skpd	1	Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi	1	Mengoptimalkan koordinasi dengan bidang, UPTD dan Sub Bagian
2	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	1	Meningkatnya tertib administrasi penyedia jasa konstruksi	1	Pelayanan satu atap dan Penyederhanaan waktu perijinan menjadi lebih singkat	1	Mengoptimalkan sarana prasarana instansi serta koordinasi yang baik antar instansi
2	Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik	1	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	1	Peningkatan infrastruktur jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata	1	Pembangunan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan

						2	Penyediaan Pedestrian atau trotoar untuk semua jalan kolektor
						3	Monitoring dan pemeliharaan kondisi jalan dan trotoar
				2	Peningkatan kualitas drainase yang bebas banjir	1	Meningkatkan kualitas dan dimensi bangunan drainase Primer dan sekunder
	Mewujudkan Kota Magelang yang tertata dan terkendali penataannya	1	Terwujudnya bangunan gedung/reklame yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan tata bangunan		Pengawasan terhadap pembangunan bangunan/reklame yang didirikan dengan melibatkan aparat dari pemangku wilayah (Kelurahan).		Memanfaatkan teknologi informasi (Website, Facebook, WhatsApp, BBM) untuk mempercepat informasi/laporan terkait aktivitas pembangunan/renovasi
			Tersedianya up date bangunan ber-IMB di Kota Magelang		Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan gedung/reklame yang sudah ber-IMB.		
					Percepatan dalam pemberian Rekomendasi Teknis IMB		
					Melakukan Input data arsip IMB ke dalam Excel		

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN PROGRAM	TAHUN DASAR 2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA
	Mewujudkan aparatur pegawai yang disiplin, profesional dan berintegritas	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Tertib administrasi perkantoran dan kepegawaian	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
				1 Penyediaan jasa surat menyurat		100.000,00		120.000		200.000		275.000		100.000		100.000
				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		155.040.000,00		142.200.000		176.700.000		336.000.000		186.000.000		186.000.000
				3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		25.648.000,00		22.500.000		28.099.000		45.050.000		58.515.000		58.515.000
				4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		45.800.000,00		44.300.000		37.000.000		74.580.000		72.080.000		72.080.000
		Terwujudnya pengelolaan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Tertib administrasi keuangan dan waktu pengiriman laporan keuangan	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	100,00%	214.600.000,00	100,00%	188.525.000	100,00%	314.858.000	100,00%	315.011.000	100,00%	313.211.000	100,00%	313.211.000
				6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		139.621.000,00		111.746.000		119.173.000		148.065.000		165.000.000		165.000.000
				7 Penyediaan alat tulis kantor		54.424.000,00		40.000.000		36.000.000		25.861.000		25.878.000		25.878.000
				8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		43.854.000,00		25.081.000		27.795.000		18.397.000		18.397.000		18.397.000
				9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12.609.000,00		10.887.000		10.060.000		8.398.000		8.398.000		8.398.000
				10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		3.900.000,00		2.520.000		2.760.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
				11 Penyediaan bahan logistik kantor		1.600.000,00		1.600.000		1.860.000		1.968.000		1.860.000		1.860.000
				12 Penyediaan makanan dan minuman		50.674.000,00		41.936.000		42.942.000		44.034.000		38.168.000		38.168.000
				13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		285.770.000,00		190.610.000		296.200.000		213.360.000		216.360.000		216.360.000
				14 Penyedia jasa Tenaga Kontrak / honorer daerah / tidak tetap		47.451.000,00		201.074.000		223.027.000		246.659.000		214.793.000		214.793.000
15 Pengelolaan administrasi kepegawaian		19.505.000,00		13.864.000		9.009.000		10.926.000		10.926.000		10.926.000				
Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	Rasio pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
		1 pembangunan rumah dinas				7.000.000.000										
		2 Pembangunan gedung kantor		382.520.000,00		119.088.000		215.785.000		12.225.000.000		17.756.910.000		10.000.000.000		
		3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional		2.183.477.000,00		314.000.000		440.640.000								
		4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor		148.667.000,00		153.496.000		177.825.000						1.000.000.000		
		5 Pengadaan peralatan gedung kantor		145.095.000,00		198.550.000		155.099.000								
		6 Pengadaan Mebeleur		20.716.000,00		170.797.000										
		7 Perencanaan Bangunan Gedung		55.290.000,00			229.412.000									
		8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		230.019.000,00		253.907.000		265.200.000		185.440.000		76.849.000		76.849.000		
		9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		435.042.000,00		337.136.000		409.946.000		275.000.000		325.000.000		325.000.000		
		10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		9.063.000,00		7.489.000		6.301.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
		11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		15.430.000,00		7.620.000		20.410.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
		12 Pemeliharaan Rutin/Berkala alat berat		125.614.000,00		121.242.000		153.627.000		100.000.000		110.000.000		110.000.000		
		13 Pengadaan jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi		234.350.000,00		67.550.000		37.250.000		56.250.000						
		14 Perencanaan Bangunan Gedung								109.250.000						
		15 Pengadaan Alat-alat pertukangan						10.000.000								
		16 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas						860.596.000								
17 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor						16.500.000										
Terwujudnya pengendalian operasional kegiatan dan keuangan perangkat daerah	Tertib pengendalian kegiatan dan pelaporan kinerja	3 Program Peningkatan disiplin aparatur														
		1 Pengadaan pakaian kerja lapangan		180.130.000,00												
		4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur														
		1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		29.572.000,00												
		5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
		1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		44.035.000,00		4.191.000		7.093.000		9.139.000		12.000.000		13.000.000		
		2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		6.381.000,00		5.050.000		7.070.000		10.636.000		12.000.000		13.000.000		
		3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		7.800.000,00												
		4 Penyusunan RKA-SKPD		45.200.000,00												
		5 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD		78.520.000,00												
		6 Penyusunan laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) SKPD		7.279.000,00								9.000.000		10.000.000		
		7 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD				19.056.000		27.356.000		16.654.000		20.000.000		22.000.000		
		8 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD				22.600.000		18.685.000		24.037.000		30.000.000		33.000.000		
		9 Penyusunan Rencana Strategis OPD				10.000.000										
10 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan OPD				39.525.000												
11 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) OPD				3.640.000		5.259.000		7.810.000		9.000.000		10.000.000				
12 Penyusunan Rencana Kerja OPD				13.280.000		11.256.000		19.014.000		22.000.000		24.000.000				
13 Penyusunan Perubahan Renstra OPD								15.000.000								
14 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD										60.590.000						
Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	942 m		942 m		942 m		1742 m		2242 m		2242 m		
			1 Perencanaan/DED Pembangunan jalan penghubung Jl Jendral Sarwo Edhi Wibowo dengan Jl Jend Sudirman		55.290.000,00											

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN PROGRAM	TAHUN DASAR 2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA
				2	Pembangunan Jalan Penghubung Jl. Tentara Genie Pelajar Kota Magelang				1.816.325.000							
				3	Pembangunan Trotoar Jalan Kalimas				2.615.775.000							
				4	Pembangunan Jalan Penghubung Jl. Sarwo Edhie Wibowo dengan Jl. Jendral Sudirman				1.500.000.000							
				5	Perencanaan/DED Pembangunan jalan Penghubung Jl. Tentara Genie Pelajar-Jl. Perintis Kemerdekaan				53.822.000	69.987.000						
					Pembangunan jalan Penghubung Jl. Tentara Genie Pelajar - Jl. Perintis Kemerdekaan					4.000.000.000		2.110.000.000				
				7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa											
				1	Pengelolaan website		25.791.000,00									
				8	Program Pengembangan Perumahan											
				1	Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA)		559.694.000,00									
				2	Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya		39.200.000,00									
				3	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)		632.648.000,00									
				4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rumah Tidak Layak Huni		100.000.000,00									
				5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Rusunawa		230.150.000,00									
				9	Program Peningkatan Keamanandan Kenyamanan Lingkungan											
				1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan		511.500.000,00									
				2	Pengendalian Keamanan Lingkungan		160.920.000,00									
				10	Program Kerjasama Pembangunan											
				1	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga		42.800.000,00									
				11	Program lingkungan sehat perumahan											
				1	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi		188.127.000,00									
				2	Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi		1.809.650.000,00									
				3	Pembangunan sarana dan prasarana MCK		154.760.000,00									
				4	Peningkatan/rehabilitasi sarana dan prasarana MCK Kelurahan Rejowinangun Selatan		112.450.000,00									
			prosentase panjang drainase dalam kondisi baik	12	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	84%		85%		86%		87%		88%		89%
				1	Rehabilitasi /Pemeliharaan Sarana dan prasarana drainase kota		474.608.000,00		474.608.000		493.928.000		492.000.000			
				2	Pembuatan Afur dan Bak kontrol Saluran Drainase		95.317.000,00									
				4	Perencanaan/DED Peningkatan saluran drainase Jl. Diponegoro				56.072.000							
				5	Perencanaan/DED Rehabilitasi saluran drainase Jalan Sultan Agung				53.672.000							
				6	Peningkatan saluran drainase Jl. Sarwo Edi Wibowo				347.775.000							
				7	Perencanaan/DED Pembangunan Shipon Sanden dan Saluran drainase Kel. Kramat Selatan				49.572.000							
				8	Perencanaan/DED Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase Jl. Soekarno Hatta				55.372.000							
				9	Pembangunan Shipon Sanden dan Saluran drainase Kel. Kramat Selatan					1.000.000.000						
				10	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota									542.000.000		
				13	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan											
				1	Sosialisasi Keciaptakaryaan		40.625.000,00									
				14	Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kearsipan											
				1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip		31.833.000,00							22.000.000		
				15	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam											
				1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA		15.524.000,00									
			Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	16	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	89%		90%		91,50%		92%		93,50%		95%
				1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan		821.505.000,00		893.983.000		871.588.000		882.000.000		882.000.000	1.000.000.000
				2	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Jurangombo Selatan		439.300.000,00									
				3	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Tidar Utara		100.000.000,00									
				4	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Wates		220.000.000,00									

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN PROGRAM	TAHUN DASAR 2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	
				5	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Potrobangsari		887.084.000,00										
				6	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Kedungsari		933.760.000,00										
				7	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Rejowinangun Utara		791.420.000,00										
				8	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Magelang		1.118.613.000,00										
				9	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Gelangan		66.300.000,00										
				10	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan jalan Dan Jembatan (DAK)		26.439.857.000,00			13.562.760.000		15.732.741.000		7.738.000.000		10.000.000.000	
				11	Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Ahmad Yani		131.322.000,00										
				12	Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Perintis Kemerdekaan		603.060.000,00										
				13	Rehabilitasi/peningkatan jalan		10.000.000.000,00										
				14	Peningkatan Median Jalan		233.760.000,00										
				15	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)			17.623.545.000									
				16	Rehabilitasi/peningkatan jalan Kalibening VI			234.225.000									
				17	DED Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase kawasan Jl. Teuku Umar			39.572.000									
				18	Perencanaan/DED Peningkatan trotoar Jl. Pahlawan			55.372.000									
				19	Perencanaan/DED Peningkatan trotoar Jl. Diponegoro			54.072.000									
				20	Perencanaan/DED peningaktan/rehab jalan Ismoyo			40.000.000									
				21	Perencanaan/DED Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan kelurahan Kedungsari			29.207.000									
				22	Perencanaan/DED Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan kelurahan Jurangombo Utara			53.572.000									
				23	Perencanaan/DED rehab/pemeliharaan jembatan (DAK)			45.072.000									
				24	Rehabilitasi/peningkatan jalan Kalibening IV			234.225.000									
				25	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang			4.223.000.000		5.000.000.000		1.078.544.000		4.033.500.000		10.000.000.000	
				26	Perencanaan/DED Pembangunan jalan Penghubung Jl. Sarwo Edi Wibowo_Jl. Jend. Sudirman			55.072.000									
				27	Perencanaan/DED Rehab/pemeliharaan/peningkatan jalan (DAK)			56.332.000									
				28	Peningkatan median jalan Soekarno Hatta			572.175.000									
				29	Studi kelayakan pelebaran jalan kalimas			54.272.000									
				30	Studi kelayakan Pembangunan Jalan Simpang Cangkuk			55.972.000									
				31	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Telaga Warna			214.225.000									
				32	Rehab/Peningkatan Jalan Jend. Sarwo Edhie Wibowo												
			Prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik	33	Peningkatan Trotoar Jl. Dr. Koesen Hirohoesodo	64,00%		64,39%		66,34%	432.875.000	66,65%		68,59%	235.000.000	71,89%	235.000.000
				34	Rehabilitasi/Peningkatan Jl. Kapten Yahya						234.225.000						
				35	Perencanaan/DED rehab/pemeliharaan jembatan (DAK)			55.237.000									
				36	Perencanaan/DED Rehab/pemeliharaan/peningkatan jalan (DAK)			106.827.000									
				37	Peningkatan median jalan Soekarno Hatta			536.175.000									
				38	Peningkatan trotoar Jl. Pahlawan			5.000.000.000									
				39	Peningkatan trotoar Jl. Diponegoro			2.620.475.000									
				40	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan kelurahan Kedungsari			340.000.000									
				41	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan kelurahan Jurangombo Utara			818.000.000									
				42	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Penghubung Jl. Sarwo Edi Wibowo-Jl. Jend. Sudirman			2.000.000.000									
				43	Peningkatan/rehab jalan Ismoyo			500.000.000									
				44	Rehab/Peningkatan Jalan Gintung			234.225.000									
				45	Perencanaan/DED Rehabilitasi/Peningkatan jalan Kalibening III			34.572.000				444.000.000					
				46	Perencanaan/DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota Magelang			54.987.000									
				47	Perencanaan/DED Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes			42.572.000									
				48	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes							632.000.000					
				49	Pemeliharaan Jalan												
				50	Rehabilitasi/Peningkatan Jl. Kalibening I												
				51	Peningkatan Trotoar Jl. Gatot Subroto									235.000.000			
				52	Rehab/Pemeliharaan Trotoar Jalan Perkotaan									5.500.000.000			
														180.000.000		1.000.000.000	
				17	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran												
				1	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran		182.667.000,00										
				2	Peningkatan Pelayanan Penggulangan bahaya kebakaran		210.905.000,00										
				18	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan												
				1	Identifikasi Jalan di Kota Magelang		67.147.000,00										
				2	Inventarisasi Aset Kawasan Jembatan Gantung Progo-Karangwuni			57.487.000									
				3	Inventarisasi Aset Kawasan Cangkuk			57.487.000									
				19	Program perencanaan pembangunan daerah												
				1	Penyusunan Rencana Strategis SKPD		15.786.000,00										
				2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD		26.559.000,00										
				20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga												
				1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga		210.000.000,00										

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN PROGRAM	TAHUN DASAR 2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA
				2 Pemeliharaan Rutin / berkala sarana prasarana olah raga		610.748.000,00										
				3 Pemasangan lampu penerangan stadion dan scoring board		3.697.700.000,00										
				21 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan												
				1 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan		72.500.000,00										
				2 Pengadaan alat-alat berat				2.427.448.000						1.150.000.000		2.500.000.000
			Persentase saluran irigasi	22 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	79%			81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	
				1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi		81.507.000,00		81507000		81.507.000		82.000.000		90.000.000		100.000.000
				2 Rehabilitasi / Pemeliharaan / Peningkatan Saluran Irigasi Kelurahan Tidar Selatan		218.165.000,00								235.000.000		235.000.000
				Rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Utara										235.000.000		
				Rehabilitasi/peningkatan saluran Kalikota												
			Persentase saluran irigasi	23 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	79%			81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	
				1 Inventarisasi Pemanfaatan ESDM dan Air Bawah Tanah Kota Magelang		68.690.000,00										
				2 Pembangunan Talud Sungai						500.000.000				235.000.000		500.000.000
				3 DED Rehabilitasi/Peningkatan Talud Sungai						54.572.000		1.715.000.000				
				4 Perencanaan/DED Pembangunan Talud Sungai Elo						54.572.000						
				24 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah												
				1 Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan		40.000.000,00										
			Persentase kawasan strategis yang terbangun	25 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				1 Pembangunan Stadion Madya (Tahap 8)		7.000.000.000,00										
				2 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Olah Raga (GOR)		5.000.000.000,00										
				3 Penataan Kawasan Budaya Mantyasih Kota Magelang Tahap II		1.164.258.000,00										
				4 Perencanaan/DED Penataan Kawasan Mantyasih		55.290.000,00										
				5 Perencanaan/DED Pembangunan Lampu Penerangan Stadion		55.290.000,00										
				6 Perencanaan/DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Olah Raga		55.290.000,00										
				7 Perencanaan/DED Rehab Sedang/Berat Gedung Olah Raga		55.290.000,00										
				8 Pembangunan Kolam Renang (Tahap 4)					11.932.050.000							
				9 Perencanaan /DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Olahraga					56.151.000							
				10 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Olah Raga (GOR) Tahap II					3.000.000.000							
				11 Penataan Ruang Terbuka Kawasan Gunung Tidar					1.099.449.000							
				12 Penataan Kawasan Budaya Mantyasih (Lanjutan)					813.285.000							
				13 Perencanaan/DED Pembangunan sarana dan prasarana gunung Tidar					56.151.000							
				14 Pembangunan Kolam Renang (Tahap 5)						12.000.000.000						
				15 Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar						2.109.130.000						
				16 Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar						1.114.610.000		1.250.000.000		1.000.000.000		2.500.000.000
				17 Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar						0				2.500.000.000		2.500.000.000
				18 Perencanaan/DED Pembangunan Gardu Pandang Tahap 2						41.371.000						
				19 Perencanaan/DED Pembangunan Kolam Renang Tahap 6						56.371.000		10.500.000.000				
				20 Perencanaan/DED Penataan Kawasan Makam Kyai Dudo						36.371.000						
				21 Perencanaan/DED Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar						56.371.000						
				22 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga								963.912.000		1.011.816.000		
				23 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga								11.482.738.000		2.975.000.000		10.000.000.000
				Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Arsitektural Gardu Pandang Gunung Tidar (Bankeu)								190.419.000				
				25 Pembangunan Gudang Canguk (Laboratorium)										3.500.000.000		
				26 Pembangunan Kolam Renang (Tahap 7)										7.500.000.000		
				27 Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap 2)										2.024.168.000		
				26 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan												
				1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan		290.580.000,00										
				2 Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan		102.750.000,00										
				27 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan												
				1 Rehabilitasi / Peningkatan Saluran drainase/ Gorong-gorong RW VII		179.000.000,00										
				2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan		100.000.000,00										

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN PROGRAM	TAHUN DASAR 2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA
				28	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Margersari											
				1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI		120.000.000,00									
				2	Rehabilitasi / Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V		288.000.000,00									
				3	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X		183.472.000,00									
				4	Rehabilitasi / Infrastruktur Perdesaan		95.239.000,00									
				29	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara											
				1	Rehabilitasi / peningkatan jalan dan Jembatan Perdesaan RW II		162.000.000,00									
				2	Rehabilitasi / peningkatan jalan dan Jembatan Perdesaan RW III		232.500.000,00									
				3	Rehabilitasi / peningkatan jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI		168.190.000,00									
				4	Rehabilitasi / peningkatan jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII		232.500.000,00									
				5	Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan		233.750.000,00									
				30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan											
				1	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II		231.968.000,00									
				2	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III		234.350.000,00									
				3	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII		317.800.000,00									
				4	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V		141.000.000,00									
				5	Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan		234.350.000,00									
				31	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara											
				1	Rehabilitasi / peningkatan jalan dan Jembatan Perdesaan RW III		177.260.000,00									
				2	Rehabilitasi / peningkatan jalan dan Jembatan Perdesaan RW X		90.200.000,00									
				3	Rehabilitasi / peningkatan jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII		63.462.000,00									
				4	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I		156.840.000,00									
				5	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII		234.350.000,00									
				6	Rehabilitasi / Infrastruktur Perdesaan		180.000.000,00									
				32	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan											
				1	Rehabilitasi / peningkatan jalan dan Jembatan Perdesaan RW III		205.091.000,00									
				2	Rehabilitasi / peningkatan jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV		63.462.000,00									
				3	Rehabilitasi / peningkatan jalan dan Jembatan Perdesaan RW V		101.620.000,00									
				4	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II		230.600.000,00									
				5	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III		76.789.000,00									
				6	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI		180.000.000,00									
				7	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII		188.925.000,00									
				8	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII		210.000.000,00									
				33	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates											
				1	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI		51.389.000,00									
				2	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V		234.350.000,00									
				3	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI		72.820.000,00									
				4	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII		179.000.000,00									
				5	Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan		141.480.000,00									
				34	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsari											
				1	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV		55.377.000,00									
				35	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari											
				1	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I		82.380.000,00									
				2	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII		51.538.000,00									
				3	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI		178.955.000,00									
				36	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara											
				1	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran drainase/ Gorong-gorong RW III		89.378.000,00									
				2	Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan		177.648.000,00									
				37	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan											
				1	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII		154.691.000,00									
				2	Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan		624.420.000,00									
				38	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirejo											

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN PROGRAM	TAHUN DASAR 2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA
				1 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III		189.000.000,00										
				2 Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan		132.000.000,00										
				39 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban												
				1 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II		74.000.000,00										
				2 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III		93.456.000,00										
				3 Rehabilitasi / Peningkatan Saluran drainase/ Gorong-gorong RW IX		165.925.000,00										
				4 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII		154.568.000,00										
				5 Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan		231.968.000,00										
				40 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara												
				1 Rehabilitasi / Peningkatan Saluran drainase/ Gorong-gorong RW XI		153.160.000,00										
				2 Rehabilitasi / Peningkatan Saluran drainase/ Gorong-gorong RW XXI		93.506.000,00										
				3 Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan		58.359.000,00										
				41 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang												
				1 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII		234.150.000,00										
				2 Rehabilitasi / Peningkatan Saluran drainase/ Gorong-gorong RW I		114.750.000,00										
				3 Rehabilitasi / Peningkatan Saluran drainase/ Gorong-gorong RW III		120.000.000,00										
				4 Rehabilitasi / Peningkatan Saluran drainase/ Gorong-gorong RW XI		221.300.000,00										
				5 Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan		234.350.000,00										
				42 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang												
				1 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II		54.672.000,00										
				2 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV		221.679.000,00										
				3 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII		172.211.000,00										
				4 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II		92.400.000,00										
				5 Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan		86.050.000,00										
				43 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan												
				1 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I		360.000.000,00										
				2 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II		124.018.000,00										
				3 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III		226.500.000,00										
				4 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII		214.500.000,00										
				5 Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan		187.154.000,00										
			prosentase panjang drainase dalam kondisi baik	44 Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	84%		85%		86%		87%		88%		89%	
				1 Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Kalijogo		1.016.367.000,00										
				2 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Gelangan		457.798.000,00										
				3 Peningkatan saluran drainase kawasan jalan perintis kemerdekaan - Jl A Yani		594.650.000,00										
				4 Perencanaan /DED Peningkatan saluran drainase kawasan Jl Beringin IV Kota Magelang		50.290.000,00										
				5 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Rejowinangun Selatan				228.170.000								
				6 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Tidar Selatan				685.225.000								
				7 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Cacaban				1.575.500.000								
				8 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Magelang				1.500.000.000								
				9 Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Singosari				1.861.500.000								
				10 Pembuatan Afur dan Bak Kontrol Saluran Drainase Kota Magelang				230.650.000								
				11 Rehabilitasi / Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Tidar Salakan				120.527.000								
				12 Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Beringin IV				1.619.970.000								
				13 Perencanaan/DED Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan Jl.Sriwijaya				55.829.000								
				14 Perencanaan/DED Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan Jl. Letjend Suprpto				54.572.000								
				15 Perencanaan/DED Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan Jl.Pahlawan				55.872.000								
				16 Perencanaan/DED Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan Kelurahan Wates				27.222.000								
				17 Perencanaan/DED Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kelurahan Kramat Utara				29.222.000								
				18 Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Bonang					2.221.500.000							
				19 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Kramat Selatan					140.000.000					235.000.000		
				20 Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan Jl. Letjend Suprpto					1.500.000.000					235.000.000		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN PROGRAM	TAHUN DASAR 2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA
				21 Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan Kelurahan Wates						210.000.000						235.000.000
				22 Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kelurahan Kramat Utara						1.300.000.000						235.000.000
				23 Rehabilitasi saluran drainase Jalan Sultan Agung						1.500.000.000						
				24 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase kawasan Jl. Teuku Umar						525.000.000						235.000.000
				25 Rehabilitasi/pemeliharaan Drainase Jl. Beringin VI						235.000.000						
				26 Perencanaan/DED Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Perintis Kemerdekaan						64.572.000		1.425.000.000				
				27 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong Jl. Rejotumoto						234.375.000						
				28 Perencanaan/DED Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran drainase Perkotaan						100.000.000						
				29 Perencanaan DED Peningkatan Saluran Drainase Jl. Tobong						71.572.000						
				30 Perencanaan/DED Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Merbabu						39.572.000						
				31 Perencanaan/DED Pemeliharaan Saluran Drainase Kelurahan Kramat Utara						79.572.000						
				32 Rehabilitasi/Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong Kawasan Jalan Sindoro						234.225.000						
				33 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Jurangombo Selatan								500.000.000				
				34 Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Kramat Utara								1.990.000.000				
				35 Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Cacaban								234.225.000				
				36 Peningkatan saluran drainase Jl. Tobong								1.609.825.000				
				37 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Sidosari								740.000.000				
				38 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ketepeng Raya								685.300.000				
				39 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Medang								1.064.000.000				
				40 Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Alun-Alun Utara								500.000.000				
				41 Kegiatan Peningkatan / Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (Bankeu)								5.170.080.000				
				42 Peningkatan saluran drainase kawasan Jl. Sumbing												235.000.000
				43 Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Jaten												235.000.000
				44 Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Rawapening												235.000.000
				45 Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Rama										235.000.000		
Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	Meningkatnya tertib administrasi penyedia jasa konstruksi	Tersedianya up date badan usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	45 Program Pengaturan Jasa Konstruksi	65%		70%		72%		74%		76%		78%		
			1 Pembinaan jasa konstruksi				75.957.000		47.937.000		44.456.000		44.456.000		45.000.000	
			2 Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi				23.220.000		21.268.000		22.012.000		41.220.000		41.220.000	
			3 Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi				49.581.000		48.811.000							
			4 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi						29.000.000		38.288.000		35.972.000		35.972.000	
			5 Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait								23.765.000		18.031.000		18.031.000	
			46 Program pengawasan jasa konstruksi													
			1 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum				434.194.000		434.194.000		431.816.000		589.060.000		589.060.000	
			2 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi								24.572.000		-		-	
			3 Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah								26.000.000		25.600.000		25.600.000	
Mewujudkan Kota Magelang yang tertata dan terkendali penataan ruangnya	Terwujudnya bangunan gedung/reklame yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan tata bangunan	Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan	47 Program Perencanaan Tata Ruang	23,00%		24,00%		24,00%		25,00%		25%		25%		
			1 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL				255.000.000		285.845.000		319.661.000		336.202.000		336.202.000	
			2 Koordinasi Penataan Ruang Daerah				176.739.000		180.985.000		162.830.000		206.314.000		206.314.000	
			3 Penyusunan Dokumen KLHS RTRW				77.060.000									
			4 Penyusunan Dokumen Ketentuan Ketinggian Bangunan				80.373.000									
			5 Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang						63.886.000							
			6 Penyusunan Raperwal Garis Sempadan Bangunan						112.872.000							
			7 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan								386.778.000		406.288.000		406.288.000	
			Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan	48 Program Pemanfaatan Ruang	23,00%		24,00%		24,00%		25,00%		25%		25%	
			1 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang				93.000.000		129.900.000		175.268.000		186.664.000		186.664.000	
			2 Survey dan pemetaan				18.136.000		33.136.000		29.648.000		35.948.000		35.948.000	
			3 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang						51.729.000		30.074.000		47.610.000		47.610.000	
			Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber-IMB	49 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang												

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN PROGRAM	TAHUN DASAR 2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA
				1	Pengawasan pemanfaatan ruang		82.800.000		148.574.000		158.137.000		336.722.000		336.722.000	
				2	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung				30.000.000				20.000.000		20.000.000	
				3	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang				15.000.000							
				4	Penyusunan Raperwal Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan				40.114.000							
				5	Fasilitas Peran Tim Ahli Bangunan								165.911.000		165.911.000	
				50	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD											
				1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			90.000.000	148.764.000		92.354.000		100.000.000		100.000.000	
					Lingkungan Hidup											
				50	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam											
				1	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA			0								
					Komunikasi dan Informatika											
				51	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa											
				1	Pengelolaan Website			7.544.000	7.544.000							
					Kepemudaan dan Olah Raga											
				52	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga											
				1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga			468.700.000	5.867.580.000							
				2	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga			938.884.000	803.892.000							
				3	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Stadion Moch Soebroto Kota Magelang			3.148.014.000								
					Kearsipan											
				53	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan											
				1	Pengklasifikasikan data			5.000.000								
				54	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan											
				1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip			12.858.000	46.139.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
					Administrasi Pemerintahan											
				55	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan											
				1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah											
				2	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota			50.000.000								
					Perencanaan											
				56	Program Pengembangan data/informasi											
				1	Penyusunan database bidang kebinamargaan			52.772.000								
				2	Penyusunan database bidang pengairan, drainase dan ESDM			0								
				57	Program Kerjasama Pembangunan											
				1	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga			67.950.000								
					Keuangan											
				58	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah											
				1	Penaksiran barang milik daerah			16.070.000	16.070.000							
				59	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan											
				1	Penyusunan data dan profil OPD				7.189.000		14.019.000		15.000.000		15.000.000	
				2	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Geografis (SIG) Jalan dan Jembatan				110.344.000							

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penjabaran secara operasional dari kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan strategis untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang adalah program dan kegiatan indikatif yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang dan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Program dan kegiatan indikatif tersebut merupakan aspek operasional dari suatu tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Langkah-langkah penyusunan program meliputi:

- 1) Identifikasi Visi, Misi, dan Sasaran Strategis OPD, yang bertujuan untuk menentukan kinerja dan/atau bentuk pelayanan yang akan dicapai oleh OPD;
- 2) Identifikasi kinerja OPD dan indikator kinerja OPD;
- 3) Penyusunan Outcome dan Indikator Kinerja Program; dan
- 4) Penamaan Program, yang didasarkan pada keterkaitan antara indikator-indikator program (*outcomes*), sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Eselon. Penjabaran lebih lanjut dari suatu program adalah kegiatan, dimana kegiatan ini memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi karena pelaksanaan kegiatan ini nantinya akan diarahkan dalam memenuhi dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Langkah-langkah penyusunan kegiatan meliputi:

- 1) Penyusunan Output Kegiatan; dan
- 2) Penamaan Kegiatan, yang didasarkan pada keterkaitan antara indikator-indikator kegiatan (outputs), sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Eselon.

perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2016-2021 ini memuat 28 (dua puluh delapan) program Urusan Pekerjaan Umum dan program Penataan Ruang yang akan di laksanakan dalam kurun waktu 2016 - 2021. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang. Di bawah ini akan disajikan rincian dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sebagai implentasi dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Untuk memperjelas dokumen perubahan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang berkaitan dengan program, perencanaan, kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab disajikan dengan tabel – tabel dibawah ini :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kota Magelang tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, dimana pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mampu mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2016-2021. Adapun indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kota Magelang Tahun 2016-2021 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja DPU-PR yang mengacu pada RPJMD Kota Magelang

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
I	Indikator Tingkat Kota								
1	Rasio penyediaan infrastruktur perkotaan	67,23%	68,61%	70,54%	75,34%	79,75%	86,44%	88,84%	88,84%
2	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	24 %	25%	25%	25%	25%	25%	25%
II	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD								
1	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	742 m	-	942 m	1342 m	1742 m	2242 m	2242 m	2242 m
2	Prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	86,49%	90,54%	91,89%	93%	94%	95%	96%	96%
3	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	86%	88,5%	90%	91,5%	92%	93,5%	95%	95%

4	Prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik	62,33%	63,71%	64,39%	66,34%	66,65%	68,59%	71,89%	71,89%
5	prosentase panjang drainase dalam kondisi baik	82,3%	84%	85%	86%	87%	88%	89%	89%
6	jumlah shipon yang dibangun	6 bh	6 bh	6 bh	7 bh	8 bh	9 bh	10 bh	10 bh
7	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	79%	79%	79%	81%	84%	86%	89%	90%
8	Persentase kawasan strategis yang terbangun	50%	62,5%	75%	84%	90%	96%	100%	100%
9	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	71,4%	71,4%	71,4%	78,57%	92,85%	92,85%	92,85%	100%
10	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	24 %	25%	25%	25%	25%	25%	25%
11	Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri	0	3%	6%	8%	10%	12%	12%	12%
12	Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber-IMB	25%	27,5%	30%	31%	33%	36%	40%	40%
13	Rasio Ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK dan RTBL)	8%	8%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Prosentase perijinan yang sesuai tata ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

15	Rasio ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	15%	15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Tersedianya update badan usaha yang mengajukan ijin usaha konstruksi baik baru maupun perpanjangan	0%	70%	72%	74%	76%	78%	80%	80%
17	Jumlah kawasan strategis yang dibangun	0	2	2	2	3	2	2	2
18	Prosentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
19	Prosentase sungai dan sumber daya air dalam keadaan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	0%	20%	40%	80%	100%	100%	100%	100%
22	Prosentase peningkatan kualitas jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi,	0%	20%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

tenaga ahli, tepat waktu dan efisien									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Program Transisi

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021. Disamping mengacu RPJMD, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang yang telah ditetapkan, bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Magelang yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016 – 2021. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang juga merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD dan sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang, di mana untuk mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022, yang harus disusun tahun 2021, sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan Renja OPD Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Renstra OPD, maka pada akhir tahun masa jabatan, Walikota berkewajiban menyiapkan rancangan RKPD Tahun 2022. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2021 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2022.

Demikian pula dengan Renstra OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2016-2021, untuk menjembatani kekosongan acuan bagi penyusunan Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2022 diperlukan program transisi, yang merupakan program-program prioritas yang harus ditangani sampai tahun 2022.

Program-program prioritas yang masuk dalam program transisi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

5. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
6. Program pembangunan jalan dan jembatan
7. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
8. Program Rehabilitasi Peningkatan/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
9. Program Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
10. Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
12. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
13. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
14. Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
15. Program Pengaturan Jasa Konstruksi
16. Program Pengawasan jasa konstruksi
17. Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
18. Program Perencanaan Tata Ruang
19. Program Pemanfaatan Ruang
20. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
21. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
22. Program Pengembangan data/informasi
23. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah dokumen rencana pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai 2016 - 2021. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang dan kegiatannya bersifat indikatif.

Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang merupakan suatu kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sesuai tugas dan fungsinya. Rencana tersebut berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari SKPD sehingga selama kurun waktu 5 (lima) tahun rencana strategis yang dibuat tersebut tetap bisa dijadikan

acuan serta diimplementasikan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD.

Dokumen perubahan renstra OPD Dinas merupakan dokumen perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 2020-2021, dalam hal ini perubahan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berfungsi sebagai pedoman dalam hal :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas yang berlaku untuk setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun 2020-2021 ditambah program dan kegiatan indikatif tahun 2022.
- b. Sebagai piranti untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dan sebagai Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas Kinerja 2 (dua) tahun, 2020-2021